

2022

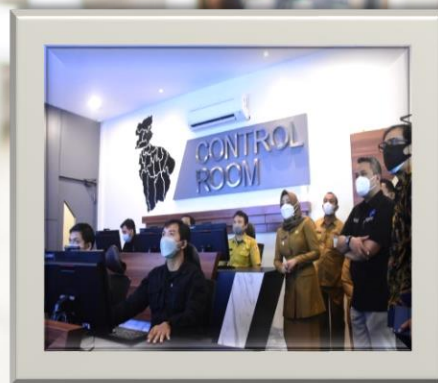


LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto merupakan perwujudan bentuk akuntabilitas sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Diskominfo Kabupaten Mojokerto dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. ARDI SEPDIANTO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19700927 199101 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Ikhtisar Eksekutif	v
SK Tim Penyusun LKjIP	
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Tugas dan Fungsi	4
1.3 Isu Strategis	11
1.4 Cascading Kinerja (Keterhubungan Dengan RPJMD)	13
1.5 Peta Proses Bisnis.....	16
1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	16
<u>BAB II</u>	
PERENCANAAN KINERJA	53
2.1 Gambaran Umum	53
2.2 Rencana Kerja	58
2.3 Perjanjian Kinerja	58
<u>BAB III</u>	
AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1 CAPAIAN KINERJA	44
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	84
<u>BAB IV</u>	
PENUTUP	102
4.1 KESIMPULAN	102
4.2 SARAN	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Form Pendanaan Indikator Pada Renstra	
B. Perjanjian Kinerja 2022	
C. Rekapitulasi Data Informasi Pengukuran Tingkat PD	
D. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja PK Pejabat Sampai Dengan Tingkat Eselon IV/setara (Berita Acara Dan Laporan Kinerja 2022)	
E. Peta Proses Bisnis (Lengkap)	
F. Cascading (Lengkap)	
G. Prestasi	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Di luar IKU, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana TIK di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto serta penyebaran informasi publik kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto ke depan. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur

Telp. (0321) 391268 Fax. (0321) 391268

Website : [http : //www.mojokertokab.go.id](http://www.mojokertokab.go.id)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 188/2084 /416-113/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 yang efektif dan efisien, agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang SAKIP;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 14 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman evaluasi AKIP;

6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto;
7. Keputusan Bupati Mojokerto No. 188.45/521/HK/416-012/2021 Tentang Tugas Sub-Koordinator dilingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto;
8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor: 188/2084/416-113/2023 Tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto dengan Keputusan Dinas 188/2084/416-113/2022 yang namanya tercantum dalam lampiran-lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusun Laporan Kinerja sebagaimana tersebut pada diktum Pertama dengan uraian tugas Mengumpulkan, Membahas, Mengolah Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : Desember 2022

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Mojokerto


Drs. ARDI SEPDianto, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19700927 199101 1 002

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO**

1. Penganggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Tugas : Memberi arahan dan masukan serta memastikan tim penyusun telah menyusun laporan kinerja sesuai ketentuan, bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan
2. Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Tugas : Memastikan tim penyusun melaksanakan tugas sesuai dengan yg ditetapkan dan data tersusun terolah dan tersaji dengan sistematika dan prinsip Akuntabel.
3. Koordinator Data :
 1. Kepala Bidang Informatika
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik
 3. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
Tugas : Memastikan menyediakan data-data terkait dengan bidang tugasnya, dan menyusun analisis capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan untuk mencapai kinerja yg diperjanjikkannya dengan kepala PD
4. Koordinator Pengolah Data: Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Tugas : Memastikan menyusun ceklis data sesuai kebutuhan dan menganalisa dan mengolah data-data terkait, untuk mencapai kinerja yg diperjanjikan dan menyajikan laporan kinerja sesuai dengan sistematika yg ditetapkan.
5. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Analis Pembangunan
 3. Staf Perencanaan
Tugas : Menyokong data pendukung sesuai kebutuhan dan menganalisa dan mengolah data-data terkait, untuk mencapai kinerja yg diperjanjikan perangkat daerah dan menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja masing-masing secara berkala.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika
3.	Koordinator Data	Kepala Bidang Pengelolaan Data Dan Statistik
4.	Koordinator Data	Kepala Bidang Informatika
5.	Koordinator Data	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
6.	Koordinator Pengolah Data	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
7.	Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.	Anggota	Analisis Pembangunan
9.	Anggota	Staf Perencanaan

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Drs. ARDI SEPDIANTO, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19700927 199101 1 002



BAB I PENDAHULUAN

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan penyederhanaan struktur organisasi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada dan dinyatakan dicabut dan menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan cita-cita bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diharapkan menjadi bersih, akuntabel, bertanggungjawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu laporan kinerja instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat, dan transparan. Selain itu laporan kinerja juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan. Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sebagai pelaksana urusan bidang komunikasi dan informatika, mempertanggung-jawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ke depannya. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan inilah, maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian keluaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada Perubahan RPJMD Kabupaten.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2022 diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan.

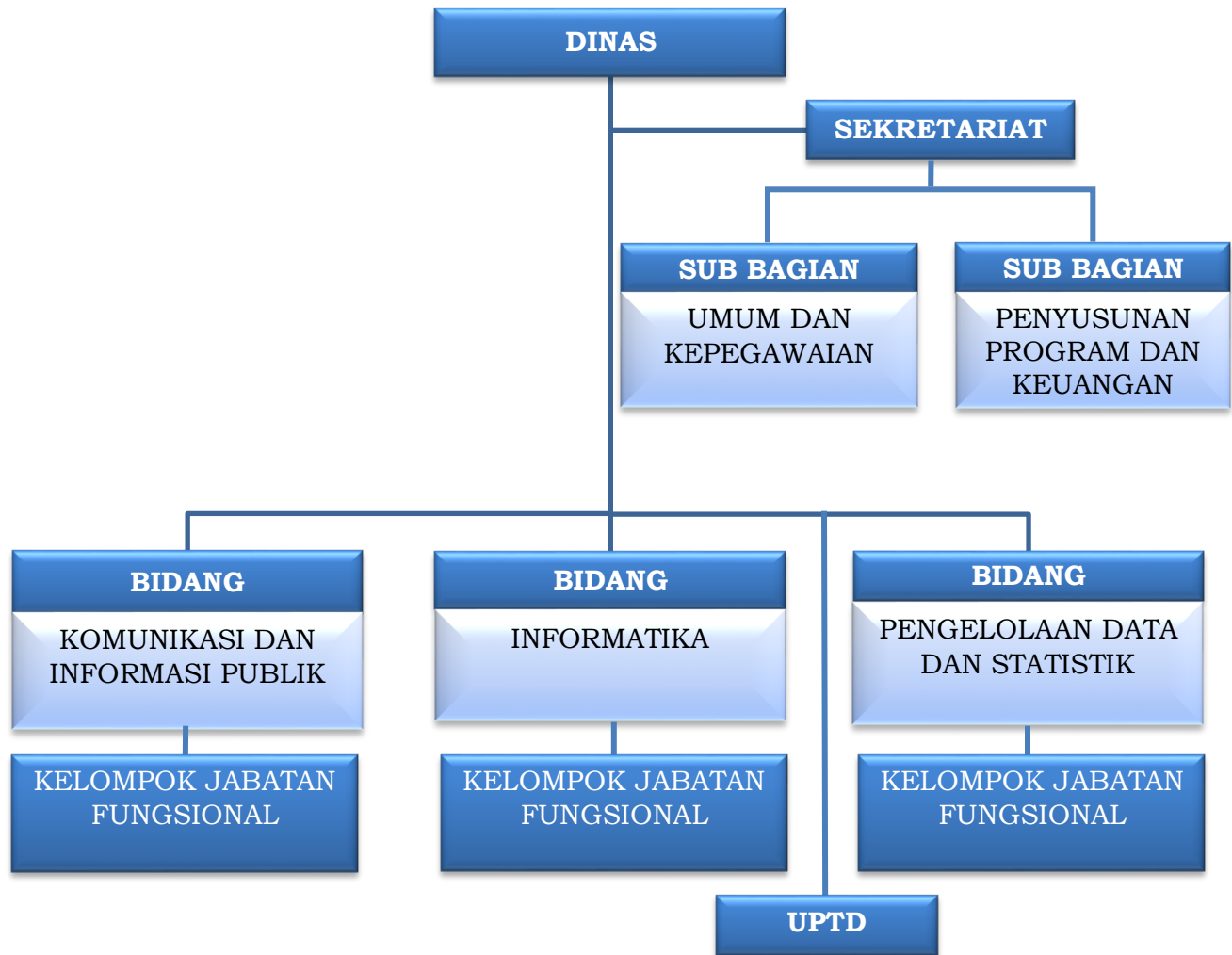
LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto selama tahun 2022 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto mempunyai komitmen dan teknis yang kuat untuk melakukan kinerja Organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*. Disisi lain penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto juga dimaksudkan sebagai aplikasi prinsip akuntabilitas yang merupakan pilar penting menjadi Instansi Pemerintahan yang menerapkan *Good Governance* secara benar dan menjadi cerminan untuk mengevaluasi kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah selama satu tahun terakhir.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto mengalami perubahan dengan ditetapkan Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
MOJOKERTO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- d. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Informatika membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengelolaan Data dan Statistik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Sekretariat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;
- e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokol;an;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. menyusun bahan koordinasi di bidang penyusunan program dan keuangan;
- e. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- f. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di

- lingkungan Dinas di bidang penyusunan program dan keuangan;
- h. menyusun laporan keuangan;
 - i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi pelayanan informasi, media komunikasi dan informasi serta aspirasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan penyusunan rencana program, anggaran, kebijakan dan pembinaan teknis bidang komunikasi dan informasi publik;
- b. pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- e. pengelolaan media komunikasi publik;
- f. pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- g. pelaksanaan layanan hubungan media;
- h. pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik;
- i. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
- j. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- k. pelaksanaan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi di daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi serta persandian dan keamanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan penyusunan rencana program, anggaran, kebijakan dan pembinaan teknis bidang informatika;

- b. perumusan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- c. pelaksanaan pengelolaan hosting, layanan domain, sub-domain, nama domain perangkat daerah dan pemerintah kabupaten;
- d. pelaksanaan pengelolaan pusat data (data center) Kabupaten Mojokerto;
- e. pelaksanaan sistem jaringan dan intra Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan manajemen data dan informasi elektronik;
- h. pelaksanaan jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan atau nir-sangkal), pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan informasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- i. pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- j. pengembangan dan pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah;
- k. pengembangan ekosistem kabupaten cerdas;
- l. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi survey dan akuisisi data, statistik serta evaluasi dan diseminasi data. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan penyusunan rencana program, anggaran, kebijakan dan pembinaan teknis bidang pengelolaan data dan statistik;
- b. pelaksanaan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan tugas sebagai wali data dalam penyelenggaraan satu data tingkat daerah;
- d. pelaksanaan survey dan akuisisi data;
- e. pelaksanaan pengolahan dan analisa data statistik;
- f. pelaksanaan evaluasi dan diseminasi data;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dapat dibentuk sub koordinator.

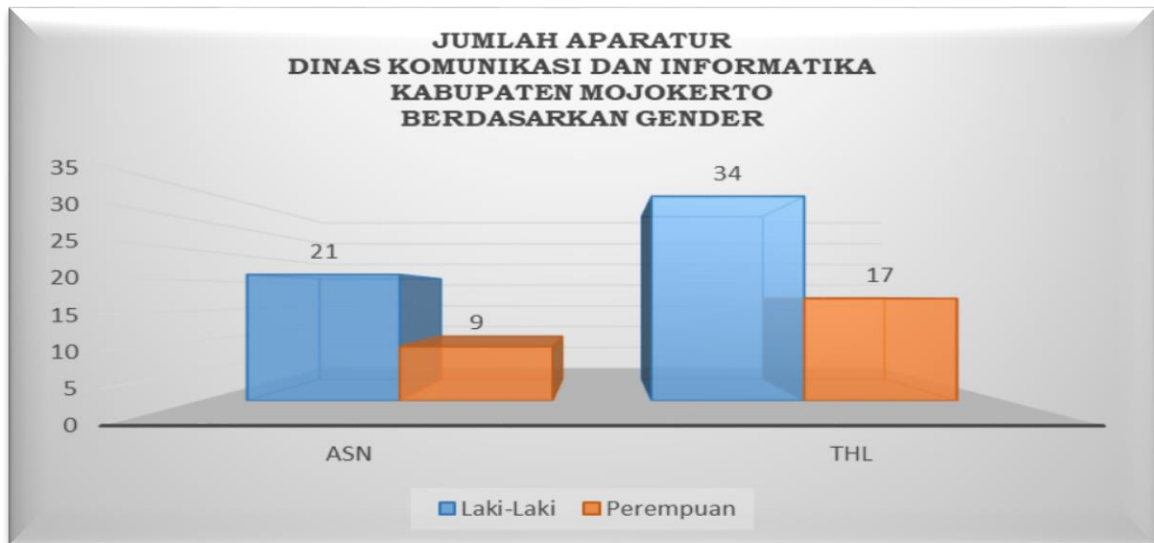
SUMBER DAYA PEGAWAI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dengan baik dan akuntabel, Kualitas Sumber Daya Manusia sangat penting. Saat ini, berdasarkan data dari Subbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto memiliki 30 pegawai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi keilmuan yang beragam. Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto per Desember 2022 berjumlah 30 orang, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jumlah Pegawai PNS	21	9	30
2	THL	34	17	51
3	Jenjang Pendidikan PNS	21	9	30
	a. SD	0	0	0
	b. SLTP/SMP	0	0	0
	c. SLTA/SMA	7	1	8
	d. Diploma (D1-D3)	1	1	2
	f. Sarjana Strata 1 (S-1)	10	2	12
	g. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	3	5	8
	h. Doktor (S-3)	0	0	0
4	Jenjang Kepangkatan PNS	21	9	30
	a. I	1	0	1
	b. II	6	0	6
	c. III	12	4	16
	d. IV	2	5	7

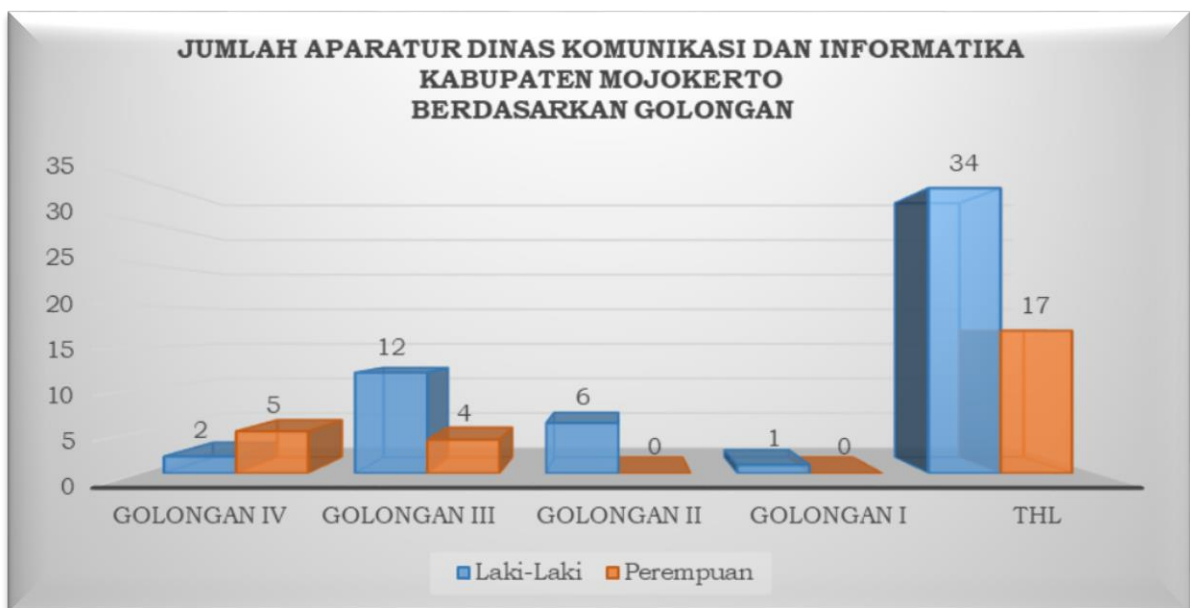
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto per Desember 2022

Gambar 1.2
Grafik Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika



Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Berdasarkan Golongan Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :

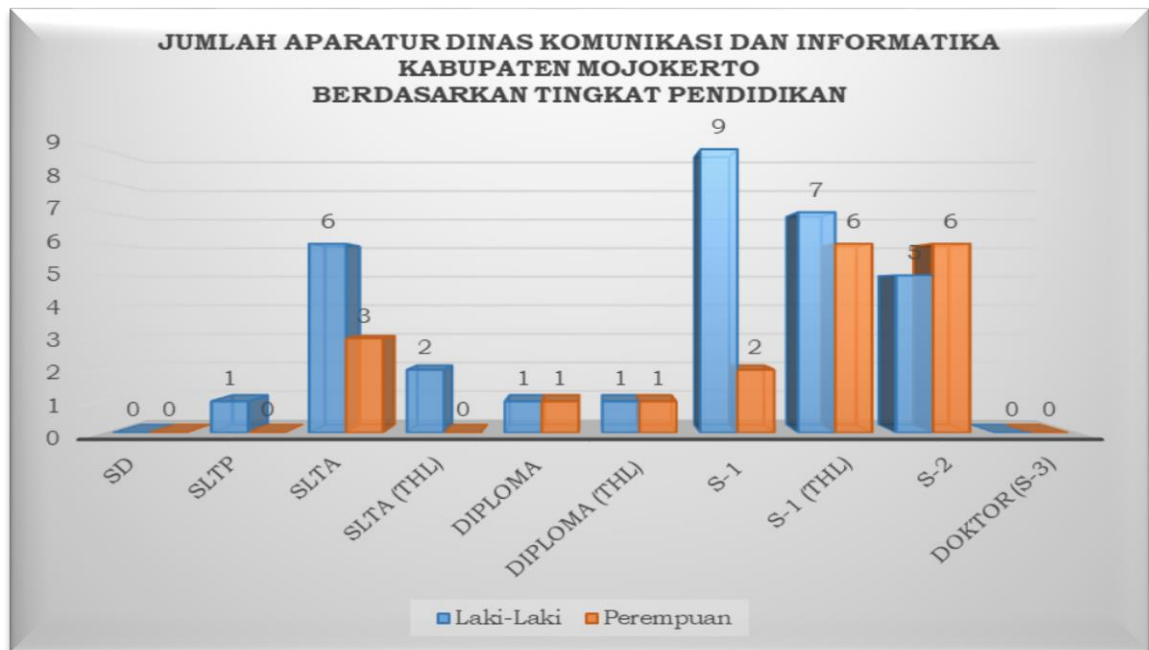
- a. Golongan IV : 7 orang
- b. Golongan III : 16 orang
- c. Golongan II : 6 orang
- d. Golongan I : 1 orang
- e. THL : 51 orang



Gambar 1.3
Grafik Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Golongan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Sedangkan jenjang pendidikan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

- a. Strata 2 : 8 orang
- b. Strata 1 : 55 orang (12 Orang ASN, 43 Orang THL)
- c. D III : 4 orang (2 Orang ASN, 2 Orang THL)
- d. SMA : 14 orang (8 Orang ASN, 6 Orang THL)
- e. SMP : - orang
- f. SD : - orang



Gambar 1.4
 Grafik Tingkat Pendidikan Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada saat ini berupa:

Kantor Operasional 3 unit yakni di:

- a. Gedung Induk Jalan KH. Hasyim Ashari no 12 Mojokerto.
- b. Bangunan di lantai 2 BAKESBANGPOL ditempati satu Bidang yaitu Bidang Informatika beralamat di Jalan A. Yani nomor 16 Mojokerto.
- c. Bangunan di lantai 2 BKPSDM adalah Ruang Comment Center dan Digital Room.

Sarana Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Dinas Kominfo memiliki sarana penunjang operasional sejumlah:

- a. Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 9 (Sembilan) unit.

b. Kendaraan roda 4 (Empat) sebanyak 5 (Lima) unit.

Berita acara perhitungan fisik persediaan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 akan dijelaskan pada tabel berikut:

LAMPIRAN
BERITA ACARA PERHITUNGAN FISIK PERSEDIAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR :900/ 01 /416-113 /2023

NO	Uraian	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Alat Tulis Kantor					
1	Kertas HVS 70 Gram	Rim	20	49.000,-	980.000,-
2	Kertas HVS 80 Gram	Rim	1	58.000,-	58.000,-
3	Ordner Folio	Buah	4	26.000,-	104.000,-
4	Tinta stempel	Pak	8	10.000,-	80.000,-
5	Pensil	Pak	2	4.000,-	8.000,-
6	Tinta Refol Toner	Buah	3	137.000,-	411.000,-
7	Isi Steples	Buah	8	2.100,-	16.800,-
8	Penghapus	Buah	26	1.200,-	31.200,-
9	Tinta Biasa	Buah	4	22.000,-	88.000,-
10	Tinta Refil Epson	Botol	8	137.000,-	1.096.000,-
11	Bolpoint	Buah	1	4.000,-	4.000,-
12	Binder klip Besar	Pak	1	26.000,-	26.000,-
13	Binder klip Kecil	Pak	1	15.000,-	15.000,-
14	Penghapus Besar	Buah	1	1.500,-	1.500,-
Jumlah Alat Tulis Kantor					2.919.500,-
Barang Cetak					
1	Cetak Kertas Kop Dinas	Lembar	200	1.200,-	240.000,-
2	Cetak Amplop Dinas Kecil	Pak	12	21.000,-	252.000,-
3	Stop Map Dinas	Lembar	60	4.000,-	240.000,-
4	Lembar Disposisi	Lembar	80	1.600,-	128.000,-
Jumlah Barang Cetak					860.000,-
Jumlah Total					3.779.500,-

1.3 ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO

Reformasi Birokrasi menjadi isu yang menjadi prioritas seluruh lembaga pemerintah di Indonesia dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Arah perubahan dalam reformasi birokrasi yaitu dari kondisi birokrasi yang tidak efektif menuju birokrasi modern mensyaratkan adanya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issued*) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto di Tahun 2022 adalah :

1. Belum terintegrasinya data dan informasi OPD yang memenuhi standart Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Belum optimalnya pembangunan aplikasi perangkat daerah yang memenuhi standar teknis
4. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral
5. Belum optimalnya implementasi keterbukaan informasi publik di lingkup Kabupaten Mojokerto di antaranya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi oleh faktor Lingkungan strategis. Adapun lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan (strenghts) (S) dan kelemahan (weakness) (W) dan lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang (opportunity) (O) dan tantangan (threats) (T).

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menetapkan factor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan.

Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan (key succes factors) yang merupakan faktor penentu yang dipandang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan sasarandengan menerapkan metode analisis SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities dan threats). Implementasi metode ini akan membantu Perangkat Daerah untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Hal yang paling buruk akan terjadi, apabila Perangkat Daerah mengembangkan kelemahannya karena ketidakmampuannya untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi. Identifikasi yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

A. Faktor Internal

1. Kekuatan (Strength)

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia dan anggaran yang cukup;
- b. Tersedianya sarana prasarana yang memadai;
- c. Tupoksi yang mendukung pengembangan e-Government / SPBE di Pemkab Mojokerto;

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola dan pengguna TIK;
- b. Belum terintegrasinya Sistem Informasi, Database, Regulasi dan Tata Kelola TIK terutama dalam tataran petunjuk teknis pengelolaan TIK di tingkat OPD;
- c. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dengan mengoptimalkan pengembangan aplikasi TIK;

B. Faktor Eksternal

1. Peluang (*Opportunities*)

- a. Dukungan Pemkab Mojokerto dalam upaya transparansi, percepatan dan peningkatan layanan publik;
- b. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan;
- c. Kebutuhan pengembangan muatan *e-Government/SPBE*;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebutuhan informasi terhadap layanan berbasis (adanya *Smart City*);

2. Ancaman (*Threats*)

- a. Globalisasi informasi dan pesatnya perkembangan TIK yang berdampak pada keterbukaan informasi publik sehingga kemungkinan kehilangan/kerusakan data akibat *system error/crash* dan kejahatan dunia maya;
- b. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata dan terdapatnya pengelolaan media informasi yang belum terjangkau sehingga masih ada kesenjangan informasi di masyarakat;
- c. Masih terdapatnya pendirian menara yang tidak sesuai dengan ketentuan;

1.4 CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment). Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Cascading Dinas KomunikasinDan Informatika Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

CASCADING
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022
(Keterhubungan Dengan RPJMD)

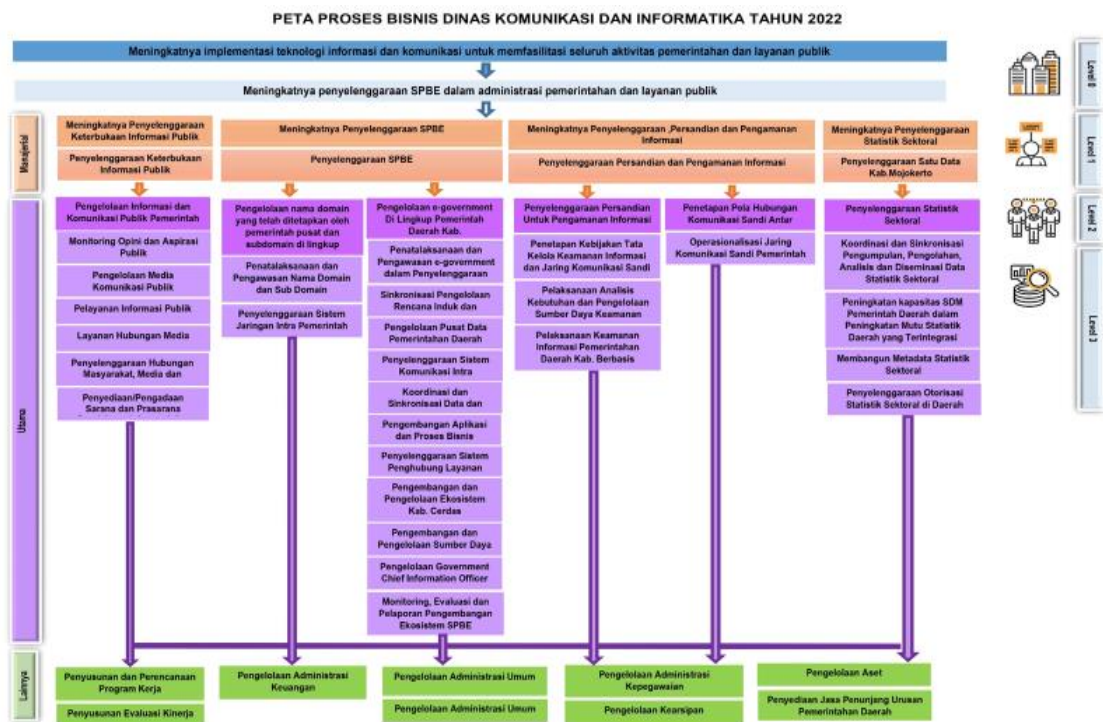
VISI			
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI 3			
Meningkatnya Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
TUJUAN (RPJMD)			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
SASARAN (RPJMD)			
Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerin			
INDIKATOR SASARAN (RPJMD)			
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			
TUJUAN OPD (SASARAN PEMDA)			
Meningkatnya Jaringan Komunikasi Dan Teknologi Informasi Untuk Mefasilitasi Seluruh Aktivitas Pemerintahan			
INDIKATOR TUJUAN			
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			
SASARAN			
Meningkatnya penyelenggaraan SPBE dalam administrasi pemerintahan dan layanan publik			
INDIKATOR SASARAN			
Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik			
PROGRAM			
Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Bidang Informatika		Bidang Pengelolaan Data dan Statistik
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Aplikasi Informatika	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Penyelenggaraan SPBE	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Diskominfo	Persentase pengelolaan subdomain (website PD)	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan dalam portal Satu Data Kab.Mojokerto
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase Sistem Elektronik/Aset Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan STRAKOM	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pengelola Data Statistik yang Terlatih
Jumlah Konten Media Komunikasi Publik Daerah yang Terkelola	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik	Jumlah Statistik Sektoral per Bidang Urusan yang Teranalisis
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks KAMI	Tersedianya buku/video profil daerah
Persentase diseminasi informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	Jumlah tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral

Jumlah media luar ruang	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral
Jumlah Rubrik Klik Mojo yang dihasilkan	Persentase layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase titik PHKS yang diamankan	Jumlah Kebijakan Statistik Sektoral
Jumlah Terpublikasinya Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah	Persentase Kesesuaian Penganggaran SPBE dengan Arsitektur SPBE		
Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		
Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan dan menyimpan data di pusat data pemda		
Jumlah Informasi yang Terpublikasikan pada Layanan Website PPID	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		
Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang terselesaikan	Jumlah Perangkat Daerah yang Terkoneksi dalam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		
Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang Terlatih IT	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		
Jumlah Layanan Call Center	Persentase PD yang memanfaatkan sertifikat elektronik		
Jumlah Pengaduan pada Layanan Aplikasi LAPOR SP4N yang Terselesaikan	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		
Jumlah Hubungan Media yang Sesuai Regulasi	Persentase PD yang mengintegrasikan datanya dalam dashboard command centre		
Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		
Layanan Hubungan Media	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		
Jumlah Hubungan Media yang Sesuai Regulasi	Persentase PD yg memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas Komunitas		
Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Persentase kegiatan yang terfasilitasi command center		
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Implementasi Smart Government		
Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		
	Jumlah pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		
	Jumlah rekomendasi/persetujuan		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		
	Jumlah kegiatan monev SPBE yang terlaksana		

	= Program
	= Kegiatan
	= Sub Kegiatan

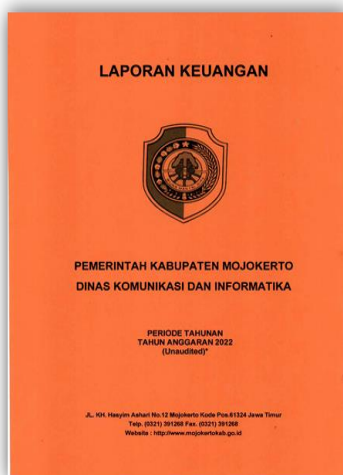
1.4 PETA PROSES BISNIS

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan bagian dari reformasi birokrasi pada area pentaan tatalaksana untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Wujud peta ini terlihat dari sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Komunikasi Dan Informatika terhindar dari tumpang tindih kinerja dan kewenangan. Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi Dan Informatika merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran OPD.



1.6 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



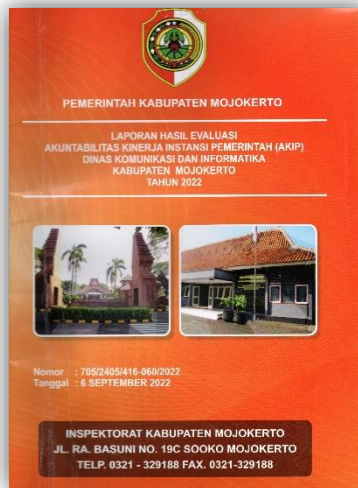
Penyusunan laporan keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan laporan ini, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah realisasi Pendapatan sebesar Rp. 752.384.000 atau 87,67 persen dan Belanja sebesar Rp. 24.655.091.262,- atau 84,14 persen dari yang dianggarkan dalam APBD TA 2022;
2. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas. Dari Laporan Operasional tersebut diinformasikan, bahwa nilai Pendapatan-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 878.246.000,- atau 0,55 Persen dan Beban adalah sebesar Rp. 23.506.622,05,-atau 34,27 persen;
3. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan Ekuitas Tahun 2022. Dari Laporan Perubahan Ekuitas didapat Ekuitas awal adalah sebesar Rp. 9.423.764.488,63 surplus/defisit-LO adalah sebesar Rp. (22.628.376.622,05,-) koreksi Ekuitas adalah sebesar Rp. 0,-.sehingga didapatkan Ekuitas akhir adalah sebesar Rp. 10.698.095.128,58;
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 10.705.878.966,58 dan Kewajiban sebesar Rp. 7.783.838,00 sehingga Ekuitas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 9.423.764.488,63.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto telah diterbitkan oleh Inspektorat pada tanggal 6 September 2022.

Pencapaian Predikat A (Memuaskan), merupakan akumulasi Penilaian Terhadap seluruh komponen AKIP yang di evaluasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	27,11
b. Pengukuran Kinerja	30,00	23,40
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	23,00
JUMLAH	100,00	85,51

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar 27,11 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan

data kinerja, serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 23,40 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 12,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas pelaksanaan evaluasi kinerja oleh internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto mencakup penilaian atas pemenuhan evaluasi kinerja internal, kualitas pelaksanaan, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal tersebut, serta pemenuhan atas rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun 2021. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar 23,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00.

REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

No	Perangkat Daerah/Bagian	Pengungkit (36,30)	Hasil (63,70)	Indeks RB	Kategori
1	Setda	31.67	52.02	83.69	A
2	RSUD Prof DR. Soekandar	32.67	50.85	83.52	A
3	Bagian Organisasi	30.11	53.21	83.32	A
4	Diskominfo	32.06	51.19	83.25	A
5	BKPSDM	31.15	51.70	82.85	A
6	Inspektorat	31.91	50.72	82.63	A
7	DP2KBP2	32.44	50.18	82.62	A
8	Kec Kemlagi	31.13	51.38	82.51	A
9	Kec Puri	34.11	48.33	82.44	A
10	DLH	32.51	49.75	82.26	A
11	DPMD	33.04	48.68	81.72	A
12	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	29.94	51.74	81.68	A
13	Bapenda	30.81	50.57	81.38	A
14	RSUD RA Basoeni	32.55	48.79	81.34	A
15	Kec Pungging	32.67	48.64	81.31	A

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

(Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar

kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa).



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka pentingnya perumusan perencanaan yang tepat atas sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan. Adapun perumusan perencanaan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026. Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021 terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai selama 5 tahun mendatang.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021– 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- **TERWUJUD** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara *LKjIP Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Mojokerto Tahun 2022* | 20

optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

- **MAJU** dalam hal ini Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental-spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- **ADIL** dalam hal ini Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector
- **MAKMUR** dalam hal ini Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut :

Misi 1 : “Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan”

Misi ini bertujuan mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, daya beli, pembangunan gender, kesalehan dan kerukunan umat beragama.

Misi 2 : “Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan sumber-sumber kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi; peningkatan PAD, investasi, laba BUMD; pertumbuhan Koperasi dan UMKM; kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya misi ini juga bertujuan untuk percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan nilai tukar petani, membangun

desa, menurunkan penduduk miskin, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan.

Misi 3 : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.”

Misi ini bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui reformasi birokrasi, ASN yang profesional dan berintegritas, pelayanan publik yang berkualitas, pengelolaan keuangan yg berkualitas, dan pemerintahan berlandaskan IT. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan *good and clean governance* dalam mendukung implementasi kota cerdas sampai pada lini desa.

Misi 4 : “Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan”

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. Adapun sasaran meliputi pembenahan lokasi kumuh, penghijauan, keselamatan transportasi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalkan resiko bencana. Kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah, termasuk didalamnya upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana. Dengan demikian diharapkan misi ini dapat tercapai.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung atas pelaksanaan **Misi 3: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.”**

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu visi misi tujuan dan sasaran pada tingkat Kabupaten sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan												
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.00	2.50	2.60	2.70	2.90	3.00	3.20	3.20	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.1.2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	
Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	
Tujuan	Sasaran
Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan dan optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Sasaran 3.6 Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan

Sedangkan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi dalam melaksanakan sasaran dan target kinerja pada Rencana Kerja Tahun 2022 berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2026 yaitu sebagai berikut :

Tujuan :

“Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan.”

Indikator Tujuan :

“Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”

Sasaran :

“Meningkatnya penyelenggaraan SPBE dalam administrasi pemerintahan dan layanan publik.

Indikator Sasaran :

“Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik.”

Tabel 2.1.3

**TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -
1	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan.	Meningkatnya penyelenggaraan SPBE dalam administrasi pemerintahan dan layanan publik.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik.	81%

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 mengamanatkan 4 (empat) tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada RPJPN Tahap Ketiga yaitu Tahun 2015—2019, pembangunan nasional difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat. Pada RPJPN tahap akhir yakni RPJMN Tahun 2020—2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, dengan highlight utama di pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Presiden Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa kita harus membajak momentum pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu :

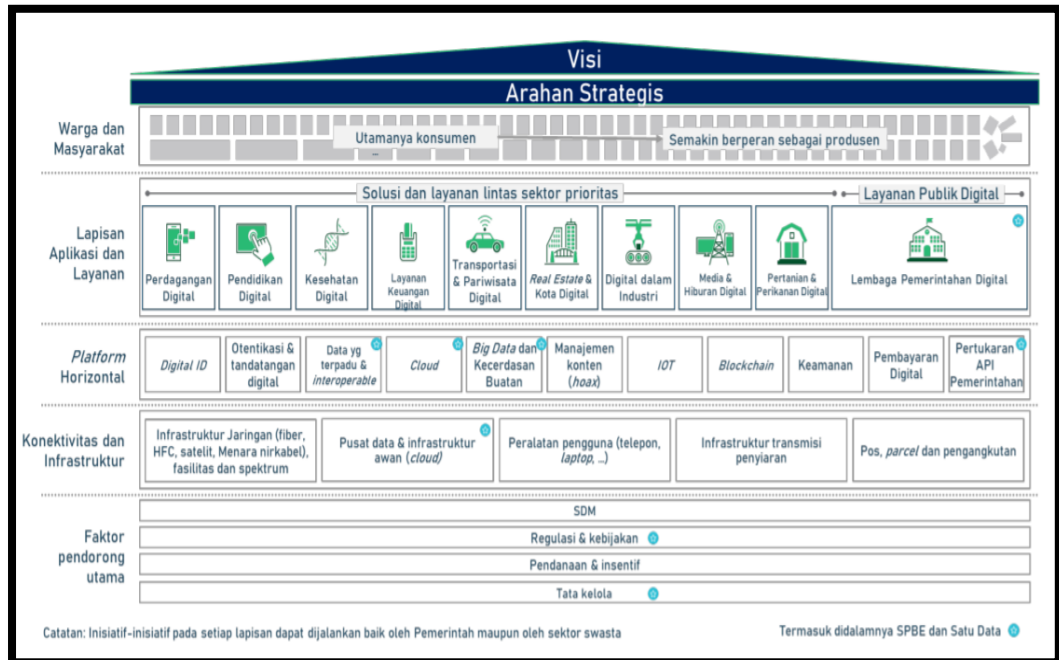
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet
2. Mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis
3. Mempercepat integrasi pusat data nasional
4. Mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta
5. Menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital.

Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah :

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;

4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.



Gambar 2.1 Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional

Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, kementerian/ lembaga terkait dan pemerintah pusat secara keseluruhan untuk mendukung mewujudkan program-program digitalisasi. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi, maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan strategis menjadi hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto pada satu dekade terakhir terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui rencana strategis lima tahunan yang disusun. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto berupaya merancang program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyediaan layanan internet dan pengembangan TIK. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 dirancang dengan merujuk pada Perpres No. 18 Tahun 2020, dan dengan meninjau hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra Kemenkominfo sebelumnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto secara aktif
LKjIP Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Mojokerto Tahun 2022 | 26

memiliki peran untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan informasi, mendorong penggunaan tanda tangan digital, pengendalian konten, dan upaya perlindungan data pribadi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto juga memiliki program-program yang ditujukan langsung ke masyarakat untuk siap menghadapi era digital, contohnya program Literasi Digital untuk meningkatkan awareness masyarakat dalam menggunakan internet dan perangkat TIK.

Transformasi digital menjadi salah satu prasyarat utama menuju 5 (lima) besar ekonomi dunia, dan menjadi semakin penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang sebelum pandemi *Covid-19* yang sedang dalam momentum pertumbuhan. Akan tetapi, proses ini tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika saja, melainkan memerlukan sinergi dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto yang juga berjalan pada lanskap digital yang sama. Untuk mengorkestrasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 15 tentang Tata Kelola SPBE dan Peraturan Bupati tentang Satu Data, Dinas Komunikasi dan Informatika menginisiasi perancangan *master plan Smart City*, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi dan konektivitas digital. Transformasi Digital pada tahun 2023 diarahkan untuk: 1) Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; 2) Mewujudkan *public service delivery* yang efisien dan cepat antara lain; 3) Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (*shared services*). Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Potensi resesi ekonomi juga mengancam perekonomian dalam negeri dengan terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi. Sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi dipaksa untuk segera mengadopsi digitalisasi agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika untuk secara optimal akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 merupakan bagian dari Renstra Kemenkominfo Tahun 2021—2026 yang diarahkan untuk mendukung 7 percepatan transformasi digital nasional, dimana fokus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto adalah untuk menuntaskan penyediaan infrastruktur TIK, mendorong percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta

mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas pokok yaitu sebagai unsur SKPD, Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Pembangunan Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat Provinsi maupun tingkat nasional.

Tabel 2.1.4

Hasil Telaah Kebijakan dan Program Nasional

NO	ARAHAN/ KEBIJAKAN	AGENDA/PROGRAM NASIONAL	STRATEGI	HIGHLIGHT SASARAN 2024	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan Infrastruktur TIK • Pemanfaatan Infrastruktur TIK • Fasilitas Pendukung Transformasi Digital 	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	Jangkauan infrastruktur jaringan tetap pitalebar (% total kecamatan)	60%
						Jangkauan infrastruktur jaringan bergerak pitalebar (% Desa)	95%
						Populasi yang terlayani penyiaran digital (%)	80%
						Fasilitasi <i>start up unicorn</i> baru (perusahaan)	8
2	Penyederhanaan Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): $\geq 2,6$ (predikat baik)	Konsolidasi Demokrasi	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50%
					Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik	Kab/ Kota 50%
					Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Skor Global Cyber Security Index	0,838

Tabel 2.1.5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mojokerto

Arah Kebijakan				
2022	2023	2024	2025	2026
Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah dengan Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas SDM melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan dilandasi Nilai Keimanan dan Ketaqwaan				

Tabel 2.1.2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan dan optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Sasaran 3.6 Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	Strategi 3.6 Upaya pengembangan sistem informasi dengan ditunjang sarana dan partasaran IT yang memadai

2.1.4 Program

Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung atas pelaksanaan program politis serta program nomenklatur sebagai berikut :

- Program Politis Misi ke 3
 - 1) Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government*
- Program Nomenklatur Misi ke 3
 1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 2. Program Aplikasi Informatika
 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2.2 RENCANA KERJA

2.2.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 menyelenggarakan program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program dan kegiatan di tahun 2022 disusun dalam rangka mencapai target Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 5 program, 11 kegiatan dan 40 sub kegiatan yang terdiri dari 17 sub kegiatan rutin (program penunjang urusan pemerintahan daerah) dan 23 sub kegiatan pembangunan sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.1

**Perubahan Program, Kegiatan dan Indikator
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)		Tahun 2022 (Sesudah Perubahan)	
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Cukai	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Bahan / Material	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Bahan / Material
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Terpenuhinya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Terpenuhinya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Komunikasi dan Informatika	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Komunikasi dan Informatika
	- Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas		- Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM
	Jumlah media luar ruang		Jumlah media luar ruang
	Jumlah Rubrik Klik Mojo yang dihasilkan		Jumlah Rubrik Klik Mojo yang dihasilkan
	-		Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Literasi Media Sosial
	Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah		Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah

	Jumlah Terpublikasinya Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah		Jumlah Terpublikasinya Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah
Pelayanan Informasi Publik	Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Pelayanan Informasi Publik	Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan
	Jumlah Informasi yang Terpublikasikan pada Layanan Website PPID		Jumlah Informasi yang Terpublikasikan pada Layanan Website PPID
	Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang terselesaikan		Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang terselesaikan
	Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang Terlatih IT		Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang Terlatih IT
	Jumlah Layanan Call Center		Jumlah Layanan Call Center
	Jumlah Pengaduan pada Layanan Aplikasi LAPOR SP4N yang terselesaikan		Jumlah Pengaduan pada Layanan Aplikasi LAPOR SP4N yang terselesaikan
Layanan Hubungan Media	Jumlah Hubungan Media yang Sesuai Regulasi	Layanan Hubungan Media	Jumlah Hubungan Media yang Sesuai Regulasi
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik		
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyelenggaraan SPBE	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyelenggaraan SPBE
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan subdomain (website PD)	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan subdomain (website PD)
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
	Persentase layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online		Persentase layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi dalam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi dalam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase PD yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase PD yang memanfaatkan sertifikat elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase PD yang mengintegrasikan datanya dalam dashboard command centre	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase PD yang mengintegrasikan datanya dalam dashboard command centre
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase PD yg memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase PD yg memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	Persentase kegiatan yang terfasilitasi command center	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	Persentase kegiatan yang terfasilitasi command center
	Persentase implementasi smart government		Persentase implementasi smart government
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah rekomendasi/persetujuan	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah rekomendasi/persetujuan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah kegiatan monev SPBE yang terlaksana	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah kegiatan monev SPBE yang terlaksana
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sistem Elektronik/Aset Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sistem Elektronik/Aset Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase titik PHKS yang diamankan	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase titik PHKS yang diamankan
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Mojokerto
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan dalam portal Satu Data Kab.Mojokerto		Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan dalam portal Satu Data Kabupaten Mojokerto
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun

Keterangan :

	Program
	Kegiatan
	Sub kegiatan

Adapun Penetapan Target Kinerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2

**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN 2022 KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
				Tahun 2022		APBD	PAPBD
KODE SKPD		2.16.2.20.2.21.05.0000					
NAMA SKPD		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
I	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	90%	90%	6.298.616.000	11.554.760.500
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	100%		
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	80%	80%		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,92 (A)	80,92 (A)		
1	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	100%	15.000.000	17.000.000
1	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	7.500.000	7.500.000
2	2.16.01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	6 Dokumen/ Laporan	6 Dokumen/ Laporan	7.500.000	9.500.000
2	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%	100%	4.638.216.000	4.276.948.000
3	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	4.638.216.000	4.276.948.000
3	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	Persentase Terepenuhinya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	1.000.000.000	38.400.000
4	2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Terepenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	60 Pegawai	60 Pegawai	-	38.400.000
5	2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Cukai	2 Kegiatan	-	1.000.000.000	-
4	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terepenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	206.000.000	6.763.412.500
6	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Terepenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	40.000.000
7	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Terepenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	6.593.412.500

8	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	22.000.000	26.000.000
9	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000
10	2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Bahan / Material	12 Bulan	12 Bulan	24.000.000	29.000.000
11	2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000
12	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Kali	80 Kali	50.000.000	50.000.000
5	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	162.400.000	172.000.000
13	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	130.000.000	130.000.000
14	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	32.400.000	42.000.000
6	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	277.000.000	287.000.000
15	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Kendaraan Dinas	15 Kendaraan Dinas	100.000.000	105.000.000
16	2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	155.000.000
17	2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Terpenuhinya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	27.000.000	27.000.000
II	2.16	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	86%	86%	4.575.000.000	6.672.548.000
7	2.16.02	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	86%	86%	4.575.000.000	6.672.548.000
18	2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Komunikasi dan Informatika - Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas	80%; 120 Berita	80%; 120 Berita	325.000.000	325.000.000
19	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Persentase diseminasi informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM - Jumlah media luar ruang - Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Literasi Media Sosial - Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah - Jumlah Terpublikasinya Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah	- 80% - 36 media luar ruang - 5 Rubrik - 57 video - 480 berita	- 80% - 36 media luar ruang - 57 OPD - 57 video - 480 berita	700.000.000	952.548.000

20	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	- Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	- 80%	- 80%	475.000.000	650.000.000
			- Jumlah Informasi yang Terpublikasikan pada Layanan Website PPID	- 60 informasi	- 60 informasi		
			- Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang Terselesaikan	- 30 pengaduan yg terselesaikan	- 30 pengaduan yg terselesaikan		
			- Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang Terlatih IT	- 3 kelompok masy.milenial yg terlatih IT	- 15 kelompok masy.milenial yg terlatih IT		
			- Jumlah Layanan Call Center	- 6 layanan call center	- 10 layanan call center		
			- Jumlah Pengaduan pada Layanan Aplikasi LAPOR SP4N yang Terselesaikan	- 160 pengaduan yg terselesaikan	- 160 pengaduan yg terselesaikan		
21	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Hubungan Media Yang Sesuai Regulasi	75 Hubungan Media	96 Hubungan Media	3.000.000.000	4.695.000.000
22	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	18 KIM yang aktif	18 KIM yang aktif	50.000.000	50.000.000
23	2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	3 Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	-	25.000.000	-
III	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyelenggaraan SPBE	81%	81%	9.799.000.000	10.479.071.865
8	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	82%	82%	8.250.000.000	8.690.071.865
24	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	8.250.000.000	8.690.071.865
9	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	80%	80%	1.549.000.000	1.789.000.000
25	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	- Jumlah tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi <i>e-government</i>	2 Kebijakan	2 Kebijakan	818.000.000	1.008.000.000
			- Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	100%		
			- Persentase layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online	100%	100%		
26	2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi dalam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	88%	88%	81.000.000	81.000.000

27	2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase PD yang memanfaatkan sertifikat elektronik	80%	100%	75.000.000	75.000.000
28	2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase PD yang mengintegrasikan datanya dalam <i>dashboard command centre</i>	50%	25%	70.000.000	70.000.000
29	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	50%	50%	110.000.000	110.000.000
30	2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase PD yg memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah	50%	25%	100.000.000	100.000.000
31	2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	-Persentase kegiatan yang terfasilitasi command center	85%	85%	70.000.000	120.000.000
			-Persentase implementasi smart government	65%	65%		
32	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	10 Orang	10 Orang	100.000.000	100.000.000
33	2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah rekomendasi/persetujuan	10 rekomendasi/persetujuan	10 rekomendasi/persetujuan	25.000.000	25.000.000
34	2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah kegiatan monev SPBE yang terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.000.000	100.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
IV	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto	76%	76%	200.000.000	397.500.000
10	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	76%	76%	200.000.000	397.500.000
35	2.21.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-57 Perangkat Daerah	-57 Perangkat Daerah	200.000.000	225.000.000
			- Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan dalam portal Satu Data Kab.Mojokerto	-400 Data	-1000 Data		
36	2.21.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral Yang Dihimpun	70%	29 dokumen	-	112.500.000
	2.21.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Dihimpun	2 kebijakan	29 dokumen	-	60.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
V	2.21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	76%	76%	200.000.000	200.000.000
11	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	76%	76%	150.000.000	150.000.000

37	2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	25.000.000	25.000.000
38	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Elektronik/Aset Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah	10 Sistem Elektronik	10 Sistem Elektronik	75.000.000	75.000.000
39	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik	3 Sistem Elektronik	3 Sistem Elektronik	50.000.000	50.000.000
12	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	33%	33%	50.000.000	50.000.000
40	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase titik PHKS yang diamankan	33%	33%	50.000.000	50.000.000
JUMLAH TOTAL						21.072.616.000	29.303.880.365

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan bertujuan untuk mewujudkan target kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah. Setiap sasaran telah ditetapkan sejumlah indikator yang terwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU). Rumusan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Sebagai implementasi dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2022, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) tahun 2022 dengan total anggaran sebesar Rp.29.303.880.365.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dengan indikator dan target capaian secara rinci dapat dilihat dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

Berikut Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 sesuai dengan target pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 :

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

No (1)	Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran Strategis (4)	Indikator Kinerja (5)	Target (6)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan.	Meningkatnya penyelenggaraan SPBE dalam administrasi pemerintahan dan layanan publik.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik.	81%

Sedangkan sesuai dengan Renstra 2021-2026 menurut visi misi kepala daerah terpilih, IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No 1	Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dalam Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik.	Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik	81%
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%
		Indeks Profesionalitas ASN	80%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.92 (A)
		Nilai RB Perangkat Daerah	78 (BB)
3	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik	86%
4	Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Penyelenggaraan SPBE	81%
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Mojokerto	76%
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	76%
7	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11,554,760,500	PAPBD 2022
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	6,672,548,000	PAPBD 2022
3	Program Aplikasi Informatika	10,479,071,865	PAPBD 2022
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	397,500,000	PAPBD 2022

Perjanjian Kinerja Beserta Laporan Kinerja Berjenjang akan disertakan pada lampiran dalam LKjIP ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan untuk Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto berkewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2022 maupun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

3.1 CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan, 39 (tiga puluh sembilan) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022, menunjukkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Mojokerto telah mencapai kinerja baik terkait pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika,

statistik dan persandian. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari penilaian sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator-indikator kinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran dilakukan dengan menggunakan skala penilaian pengukuran dengan masing-masing kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator sasaran bermakna capaian positif

SKOR	CAPAIAN	KATEGORI
4	> 100%	Sangat Baik
3	75% - 100%	Baik
2	55% - 74%	Cukup
1	< 55%	Kurang

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;

Adapun pencapaian Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika tahun 2022 sebagaimana disampaikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Berdasarkan Target Pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target					Realisasi	Capaian
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2022
1	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	2,7	2,9	3	3,2	2,73	105%

Bahwa berdasarkan Rancangan Pemerintahan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, hasil pencapaian Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada indikator tujuan dengan target tahun 2022 yaitu 2,6 dan perolehan nilai indeks SPBE yaitu 2,73 sehingga tingkat capaian sebesar 105%.

Berikut ini tabel hasil pencapaian target selama 3 (tiga) tahun terakhir :

Tabel 3.3
Realisasi Pencapaian Target Indikator Tujuan

NO	INDIKATOR TUJUAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		1,74		1,55	2,6	2,71	2,6	2,73

Indeks SPBE berdasarkan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang menjadi tujuan dan Indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 terjadi kenaikan nilai yang signifikan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Kementerian PAN-RB terkait analisa atas aspek penilaian indeks SPBE di tahun 2022 dapat disampaikan bahwa sudah dapat menggambarkan predikat Baik (2.73) dalam penerapan SPBE. secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Kabupaten Mojokerto. Jika dilihat dari aspek SPBE, aspek Tata Kelola, dan Manajemen SPBE masih lemah, sedangkan aspek kebijakan dan aspek layanan tergolong standar.

Secara umum keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kabupaten Mojokerto masih belum ada. Namun jika dilihat per indikator, sebagian indikator dalam Layanan Administrasi merupakan indikator yang unggul. Hal ini dikarenakan Layanan Administrasi tersebut merupakan Layanan Umum Nasional misalnya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara, Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi, dan Layanan Kinerja Pegawai. Sedangkan kelemahannya terlihat pada aspek Tata Kelola, dan Manajemen SPBE. Pada aspek Tata kelola, dokumen Peta Rencana SPBE masih belum lengkap. Implementasi TIK masih belum mencakup seluruh unit kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Manajemen SPBE masih belum terencana dan belum dijalankan. Secara umum Kebijakan SPBE sudah memenuhi aspek kebijakan, namun hanya dua kebijakan yang masih perlu ditingkatkan lagi cakupan pengaturannya yaitu Kebijakan Arsitektur SPBE, dan Kebijakan Peta Rencana SPBE. Untuk layanan Pusat Data, Kabupaten Mojokerto perlu melengkapi Pusat Data tersebut dan Prosedur Baku pengoperasian Pusat Data.

Sistem Penghubungan Layanan Pemerintah Kabupaten Mojokerto

melalui SIMANTRA, namun demikian masih terbatas beberapa aplikasi yang menggunakannya. Sedangkan dalam hal penyelenggaraan SPBE, Tim Koordinasi SPBE sudah melakukan tugasnya, namun demikian kegiatan tersebut perlu dievaluasi capaiannya. Secara keseluruhan aspek Manajemen SPBE, Kabupaten Mojokerto perlu merencanakan kegiatan manajemen SPBE yang meliputi Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan. Selain itu, panduan untuk melakukan manajemen SPBE juga perlu dibuat dan Audit TIK Kabupaten Mojokerto juga perlu direncanakan dan dilaksanakan yang meliputi atas audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan. Disamping itu dalam Aplikasi layanan administrasi Kabupaten Mojokerto sudah memenuhi aspek Layanan Administrasi dan bahkan beberapa indikatornya dinyatakan unggul.

Seperti telah diuraikan diatas, 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika seluruhnya dapat tercapai dengan rincian lebih lanjut dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Tabel Capaian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
1	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,60	2,73	105%
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dalam Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik.	Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik	81%	103%	127,16
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100%	80%	80%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	84,14%	93,48%
		Indeks Profesionalitas ASN	80%	81,61% (th.2021)	102,01%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,92 (A)	85,51 (A)	105,67%
		Nilai RB Perangkat	78 (BB)	83,25 (A)	106,73%

		Daerah			
3	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik	86%	95,16%	110,65%
4	Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Penyelenggaraan SPBE	81%	98,13%	121,14%
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Mojokerto	76%	119,83%	157,68%
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	76%	74,88%	98,53%
7	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	9 Inovasi	450%

Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto di tahun 2022 dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik dengan target 81%, dan realisasi sebesar 103% sehingga tingkat capaian 127,16%.
2. Indikator Persentase Indikator Program Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi sebesar 103% sehingga tingkat capaian 127,16%
3. Indikator Persentase Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik dengan target 86% dan realisasi 95,16% sehingga tingkat capaian 110,65%
4. Indikator Persentase Penyelenggaraan SPBE dengan target 81% dan realisasi 98,13% sehingga tingkat capaian 121,14%
5. Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Mojokerto dengan target 76% dan realisasi 119,83% sehingga tingkat capaian 157,68%
6. Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dengan target 76% dan realisasi sebesar 74,88% sehingga tingkat capaian 98,53%
7. Indikator Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target 2 inovasi dan realisasi sebanyak 9 inovasi meliputi e-agenda, si-jamed, e-sppd, satu data palapa, e-office, damarmojo, CIS, Call Center 112 dan *Smart City*

Dari hasil keseluruhan pencapaian kinerja diperoleh sebagian besar persentase capaian dari realisasi dan target menunjukkan pencapaian yang sangat baik.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang di Evaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
			K	K	K
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%		99,61%
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	100%	80%	80%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	84,14%	93,48%
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	80%	80,23%	100,29%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,92 (A)	85,51 (A)	105,67%
		Nilai RB Perangkat Daerah	78 (BB)	83,25 (A)	106,73%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%		100,00%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	6 Dokumen/ Laporan	6 Dokumen/ Laporan	100,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%		100,00%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		100,00%
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	32 Pegawai	32 Pegawai	100%

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		97,68%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Terpenuhiya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Terpenuhiya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
9	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Waktu Terpenuhiya Kebutuhan Bahan / Material	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
10	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Terpenuhiya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Kali	67 Kali	83,75%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100,00%
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Terpenuhiya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100,00%
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Kendaraan Dinas	14 Kendaraan Dinas	100,00%
15	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
16	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Terpenuhiya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
2	PROGRAM INFORMASI	Persentase Capaian	86%		110,65%

	DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik			
7	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%		95,16%
17	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Komunikasi dan Informatika	80%	88,98%	111,23%
		- Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas	120 Berita	120 Berita	100,00%
18	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	80%	90%	112,50%
		Jumlah media luar ruang	36 Media Luar Ruang	36 Media	100,00%
		Jumlah Rubrik Klik Mojo yang dihasilkan	5 Rubrik		0,00%
		Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah	57 Video	77 Video	135,09%
		Jumlah Terpublikasinya Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah	480 Berita	839 Berita	174,79%
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Literasi Media Sosial	57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah	100,00%
19	Pelayanan Informasi Publik	Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	80%	100%	125,00%
		Jumlah Informasi yang Terpublikasikan pada Layanan Website PPID	60 Informasi	71 Informasi	118,33%
		Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang terselesaikan	30 Pengaduan yg Terselesaikan	50 Pengaduan	166,67%
		Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang Terlatih IT	15 Kelompok	13 Kelompok	86,67%
		Jumlah Layanan Call Center	10 Layanan Call Center	13 Layanan	130,00%
		Jumlah Pengaduan pada Layanan Aplikasi LAPOR SP4N yang Terselesaikan	160 Pengaduan yg Terselesaikan	82 Pengaduan	51,25%
20	Layanan Hubungan Media	Jumlah Hubungan Media yang Sesuai Regulasi	96 Hubungan Media	94 Hubungan Media	97,92%
21	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	18 KIM yang aktif	10 KIM yang aktif	55,56%
3	PROGRAM APLIKASI	Persentase	81%		121,14%

	INFORMATIKA	Penyelenggaraan SPBE			
8	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100,00%
22	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100,00%
9	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%		96,25%
23	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100,00%
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	100%	100,00%
		Persentase layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online	100%	100%	100,00%
24	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi dalam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	88%	100%	113,64%
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase PD yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100%	100%	100,00%
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase PD yang mengintegrasikan datanya dalam dashboard command centre	25%	8,77%	35,08%
27	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	50%	74%	148,00%
28	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase PD yg memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah	25%	0%	0,00%
29	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	Persentase kegiatan yang terfasilitasi command center	85%	66%	77,65%
		Persentase implementasi	65%	100%	153,85%

		smart government			
30	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	10 Orang	10 Orang	100,00%
31	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah rekomendasi/persetujuan	10 Rekomendasi/Persetujuan	15 Rekomendasi/Persetujuan	150,00%
32	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah kegiatan monev SPBE yang terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	76%	-	98,53%
10	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%		70,04%
33	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100,00%
34	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Elektronik/Aset Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah	10 Sistem Elektronik	3 Sistem Elektronik	30,00%
35	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik	3 Sistem Elektronik	3 Sistem Elektronik	100,00%
		Indeks KAMI	sistem elektronik bernilai tinggi(16) & status kesiapan cukup (460)	sistem elektronik bernilai rendah (15) & status kesiapan cukup (123)	60,24%
11	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	100%	26,31%	79,73%
36	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase titik PHKS yang diamankan	33%	26,31%	79,73%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Penyelenggaraan Satu	76%		157,68%

	STATISTIK SEKTORAL	Data Kab Mojokerto			
12	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Mojokerto	100%		119,83%
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah	100,00%
		Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan dalam portal Satu Data Kab.Mojokerto	1000 Data	2190 Data	219,00%
38	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	29 Dokumen	29 Dokumen	100%
39	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	29 Dokumen	29 Dokumen	100%

Keterangan :

	Program
	Kegiatan
	Sub kegiatan

Adapun hasil realisasi kinerja program, kegiatan, sub kegiatan berdasarkan pada hasil desk atas realisasi kinerja pada bidang-bidang yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyusun LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana terinci pada Berita Acara Laporan Realisasi Kinerja Tahun 2022 pada lampiran LKjIP ini.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.6

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output)	Target Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2021	No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan 2022	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output)	Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2022
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1	Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dalam Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	99,61%	99,61%
			Persentase Indikator Program Diskominfo yang Tercapai	100%	80				Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	100%	80%	80%
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	91.37%				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	84,14%	93,48%
			Indeks Profesionalitas ASN	76%	82,90%				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	80%	80,23%	100,29%
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Program Penunjang PD	100%	90.26				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,92 (A)	85,51 (A)	105,67%
			Nilai SAKIP PD	76 (BB)	80,40 (A)				Nilai RB Perangkat Daerah	78 (BB)	83,25 (A)	106,73%
			Nilai Reformasi Birokrasi PD	63 (B)	73,26				Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	100%	117,52%	117,52%
1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%	100%	1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%		100,00%
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	2 Dokumen	2 Dokumen	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	6 Dokumen/Laporan	6 Dokumen/Laporan	100,00%

2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%		100,00%
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1 Bulan	3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
4		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	15 Laporan	15 Laporan	4		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tersusun sesuai Ketentuan			
						3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		100,00%
						5		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	32 Pegawai	32 Pegawai	100%
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		97,68%
5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	9		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
7		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Pemenuhan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	11		Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Peggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%

								Penggandaan				
9		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Bahan / Material	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
10		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Waktu Pemenuhan Bahan/Material Kantor	12 Bulan	12 Bulan	13		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
11		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pemenuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	14		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Kali	67 Kali	83,75%
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50%	6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100,00%
12		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	16		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
13		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	-	17		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
5		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	101,28%	7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100,00%
14		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14 Kendaraan Dinas	14 Kendaraan Dinas	18		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Kendaraan Dinas	14 Kendaraan Dinas	100,00%

		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			Jumlah Waktu Pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan							
15		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	19		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
			Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	2x Rehabilitasi	2x Rehabilitasi							
16		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	20		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Terpenuhinya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS MEDIA KOMUNIKASI, LAYANAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN DOKUMENTASI	87%	113,42%	2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	86%		110,65%
6		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Mojokerto	87%	113,42%	8		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%		95,16%

17		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Komunikasi dan Informatika	1 Survey IKM	1 Survey IKM	21		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Komunikasi dan Informatika	80%	88,98%	111,23%	
			Jumlah Opini dan Aspirasi Publik Yang Menjadi Isu Prioritas	12 Opini & Aspirasi Publik Yang Menjadi Isu Prioritas	12 Opini & Aspirasi Publik Yg Menjadi Isu Prioritas						- Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas	120 Berita	120 Berita
18		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Program Siaran Radio	120 Program Siaran Radio WIKA	120 Program Siaran Radio WIKA			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	80%	90%	112,50%	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah Yang Terdokumentasi dan Terpublikasikan dalam Website Pemerintah Daerah dan Media Sosial Lainnya	700 Kegiatan Terdokumentasi dan Terpublikasi ;	700 Kegiatan Terdokumentasi dan Terpublikasi					Jumlah media luar ruang	36 Media Luar Ruang	36 Media	100,00%
										Jumlah Rubrik Klik Mojo yang dihasilkan	5 Rubrik		0,00%
										Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah	57 Video	77 Video	135,09%
										Jumlah Terpublikasinya Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah	480 Berita	839 Berita	174,79%
										Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Literasi Media Sosial	57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah	100,00%
19		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial Yang Terlatih IT	2 Kelompok Masyarakat Milenial Yang Terlatih IT	2 Kelompok Masyarakat Milenial Yang Terlatih IT			Pelayanan Informasi Publik	Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	80%	100%	125,00%	
									Jumlah Informasi yang Terpublikasikan pada Layanan Website PPID	60 Informasi	71 Informasi	118,33%	
									Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang terselesaikan	30 Pengaduan	50 Pengaduan	166,67%	
			Jumlah PPID Perangkat Daerah Yang Sesuai Regulasi	25 PPID PD	25 PPID PD					Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang Terlatih IT	15 Kelompok	13 Kelompok	86,67%

			Jumlah Pengaduan Pada Layanan Aplikasi LAPOR! SP4N	112 Pengaduan Masuk&Terselesaikan	112 Pengaduan Masok&Terselesaikan				Jumlah Layanan Call Center	10 Layanan Call Center	13 Layanan	130,00%
			Jumlah Trial Layanan Call Center		-				Jumlah Pengaduan pada Layanan Aplikasi LAPOR SP4N yang Terselesaikan	160 Pengaduan	82 Pengaduan	51,25%
20		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat Yang Terbina	5 KIM yang Terbina	5 KIM yang Terbina	26		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	18 KIM yang aktif	10 KIM yang aktif	55,56%
3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	INDEKS SPBE	87%	99,46%	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyelenggaraan SPBE	81%		121,14%
7		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemda	87%	100%	9		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100,00%
21		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Jaringan Internet	90 Jaringan Internet	90 Jaringan Internet							
8		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemda Kab.Mojokerto	87%	98,93%	10		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%		96,25%

								Kabupaten / Kota					
22		Penatalaksanaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengelolaan Aplikasi E-Government	20 Aplikasi E-Gov	20 Aplikasi E-Gov	30			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100,00%
										Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	100%	100,00%
										Persentase layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online	100%	100%	100,00%
23		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Menu Website	10 Menu Website	10 Menu Website	33			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi dalam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	88%	100%	113,64%
										Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase PD yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100%	100%
24		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Pengelolaan Subdomain	90 Subdomain	90 Subdomain	35			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase PD yang mengintegrasikan datanya dalam dashboard command centre	25%	8,77%	35,08%
25		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi	20 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi	20 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi	36			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	50%	74%	148,00%
						37			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Persentase PD yg memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah	25%	0%	0,00%

								Pemerintah				
26		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Kegiatan Yg Terfasilitasi Command Center	100 Kegiatan	85 Kegiatan			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	Persentase kegiatan yang terfasilitasi command center	85%	66%	77,65%
			Jumlah Uji Coba Penerapan teknologi informasi dan IOT untuk Kota Cerdas	4 Case IOT	4 Case IOT				Persentase implementasi smart government	65%	100%	153,85%
27		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM TIK Yang Terlatih	20 ASN TIK yg Terlatih	20 ASN TIK yang Terlatih			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	10 Orang	10 Orang	100,00%
						40		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah rekomendasi/persetujuan	10 Rekomendasi/Persetujuan	15 Rekomendasi/Persetujuan	150,00%
28		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Monev dan Rakor Tim Yang Terlaksana	4 Monev dan Rakor Tim Yang Terlaksana	4 Monev dan Rakor Tim yang Terlaksana	41		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah kegiatan monev SPBE yang terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	88%	84,03%	4		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	76%	-	98,53%
10		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemda Kab Mojokerto	88%	84,73%	11		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /	Persentase Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%		70,04%

								Kota				
						42		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100,00%
30		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ruang Lingkup Keamanan Informasi Yg Teraudit	3 ruang lingkup keamanan informasi yg teraudit	3 ruang lingkup keamanan informasi yg teraudit	43		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Elektronik/Aset Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah	10 Sistem Elektronik	3 Sistem Elektronik	30,00%
31		Pelaksanaan Keamanan Informasi	Jumlah Penerimaan Berita Sandi dan Yang Tersampaikan	370 Berita Sandi	514 Berita Sandi			Pelaksanaan Keamanan Informasi	Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik	3 Sistem Elektronik	3 Sistem Elektronik	100,00%
		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Indeks KAMI	17% Tingkat kematangan II	-	44		Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Indeks KAMI	sistem elektronik bernilai tinggi(16) & status kesiapan cukup (460)	sistem elektronik bernilai rendah (15) & status kesiapan cukup (123)	60,24%
11		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kab Mojokerto	88%	83,03%	12		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	100%	26,31%	79,73%

								Kabupaten / Kota				
32		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab.Mojokerto	18 Jaring Komunikasi Sandi	15 Jaring Komunikasi Sandi	45		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase titik PHKS yang diamankan	33%	26,31%	79,73%
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE PENINGKATAN PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI, PERSANDIAN, PENGAMANAN INFORMASI DAN STATISTIK SEKTORAL	88%	95,27%	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto	76%		157,68%
9		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, Persandian, Pengamanan Informasi dan Statistik Sektoral	88%	95,27%	13		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Mojokerto	100%		119,83%
29		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	Jumlah Aplikasi/Dokumen Statistik Sektoral	2 Apl/Data Statistik	2 Apl/Data Statistik	46		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah	100,00%
			Jumlah Pengumpulan Data	222 Data Menara	201 Data Menara				Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan dalam portal Satu Data Kab.Mojokerto	1000 Data	2190 Data	219,00%
						48		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	29 Dokumen	29 Dokumen	100%
						49		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	29 Dokumen	29 Dokumen	100%

Tabel 3.7

**PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM TAHUN 2020, 2021 DAN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
		Target 2020	Realisasi Kinerja 2020	Realisasi IKU	Capaian IKU	Target 2021	Realisasi Kinerja 2021	Realisasi IKU	Capaian IKU	Target 2022	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi IKU	Capaian IKU
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika	IKM terhadap pelayanan komunikasi dan informatika	90,00	96,55	78,87	87,63	95,00	96,49	76,33	80,34				
Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dalam Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik	Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik.									81%	117,52%	103%	127,16%

Dalam tabel diatas disajikan perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) beberapa tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022. Terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 dan 2021 dengan IKU tahun 2022. IKU tahun 2020 dan 2021 berdasarkan pada penetapan RPJMD Tahun 2016-2021 sedangkan IKU tahun 2022 mengikuti penetapan RPJMD Tahun 2021-2026. Capaian IKU di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan pada indikator IKM terhadap pelayanan komunikasi dan informatika senilai 7,29 dari capaian 87,63 menjadi 80,34 hal ini dikarenakan perbedaan jumlah target masyarakat yang menjadi responden atas IKM Diskominfo yaitu 1000 orang.

Di tahun 2022 berdasarkan nilai IKM melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Tmur (SuKMa-e Jatim) pada Nilai IKM Kabupaten Mojokerto untuk Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu 88,85% dengan responden sebanyak 65 orang. Sedangkan untuk realisasi IKU Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2022 dengan indikator Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik yaitu 117,52% dari target 81% sehingga capaian IKU menjadi 127,16% dengan kategori sangat baik.

Realisasi 117,52% merupakan hasil perhitungan formulasi sebagai berikut :
Rata-Rata Realisasi Kinerja (Program Aplikasi Informatika & Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi), Realisasi Kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik, Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Keterangan :

- Penyelenggaraan SPBE = Persentase Penyelenggaraan SPBE mengacu pada bobot indikator dalam perhitungan Indeks SPBE sehingga diperoleh komposisi : 82,3% untuk Program aplikasi informatika ; 17,7% untuk Program Persandian
- Penyelenggaraan Satu Data = Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik = Realisasi Kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika

PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika

Tabel. 3.8

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI KINERJA					CATATAN ANALISIS
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik	81%	82%	83%	84%	85%	103%					Capaian kinerja tahun 2022 merupakan capaian atas realisasi kinerja di tahun pertama untuk tahun renstra 2021-2026 sehingga belum bisa diperbandingkan capaian kinerjanya karena indikator kinerja di tahun sebelumnya berbeda dengan indikator tahun renstra 2021-2026. Target renstra setiap indikator yang tercantum merupakan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada RPJMD Tahun 2021-2026.
2	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	80%					
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	90%	90%	90%	90%	84,14%					
	Indeks Profesionalitas ASN	80%	82%	83%	84%	85%	81,61% (th.2021)					
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,92 (A)	81,72 (A)	82,53 (A)	83,32 (A)	84,12 (A)	85,51 (A)					
	Nilai RB Perangkat Daerah	78 (BB)	79 (BB)	80 (A)	81 (A)	82 (A)	83,25 (A)					
3	Persentase Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik	86%	86%	87%	87%	88%	95,16%					
4	Persentase Penyelenggaraan SPBE	81%	82%	83%	84%	85%	98,13%					
5	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Mojokerto	76%	77%	78%	79%	80%	119,83%					
6	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	76%	77%	78%	79%	80%	74,88%					

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto dalam periode renstra 2021-2026 membandingkan realisasi kinerja yang menjadi indikator tujuan OPD yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target dan standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB dengan realisasi kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Berikut disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu dengan realisasi kinerja pada Provinsi Jawa Timur atas Indeks SPBE.

Tabel 3.9

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu dengan realisasi kinerja pada Provinsi Jawa Timur

Indikator Kinerja	Provinsi Jawa Timur			Diskominfo Kab.Mojokerto			Provinsi Jawa Timur			Kab. Mojokerto		
	Tahun 2021						Tahun 2022					
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks SPBE												
Nilai	2,6	2,82	108,46%	2,6	2,71	104,23%				2,6	2,73	105%
Predikat	Baik	Baik		Baik	Baik					Baik	Baik	

Berdasarkan hasil capaian atas nilai Indeks SPBE Kabupaten Mojokerto dapat dilihat bahwa indeks SPBE Kabupaten Mojokerto masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian indeks SPBE pada Provinsi Jawa Timur, akan tetapi terjadi kenaikan capaian nilai indeks SPBE Kabupaten Mojokerto di tahun 2022 jika dibandingkan dengan indeks SPBE tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan serta perbaikan kualitas pada beberapa aspek sehingga nilai tingkat kematangan menjadi bertambah. Adapun Hasil Evaluasi Indeks SPBE Kabupaten Mojokerto dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

1. Faktor pendorong keberhasilan kinerja

Beberapa faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja pada **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** antara lain :

- a. Komitmen tinggi dari Bupati Mojokerto dalam penyelenggaraan kebijakan satu data di Kabupaten Mojokerto melalui penetapan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Palapa.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan kebijakan satu data di Kabupaten Mojokerto oleh Bupati sampai dengan Kepala Perangkat Daerah melalui kegiatan Forum Satu Data Palapa maupun kegiatan rapat staf rutin yang dipimpin oleh Bupati.
- c. Komitmen dan partisipasi aktif Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan kebijakan satu data di Kabupaten Mojokerto mulai dari tingkat Kepala Perangkat Daerah, pejabat yang membidangi perencanaan dan penyusunan program, sampai dengan pejabat/staf yang telah ditunjuk sebagai admin portal Satu Data Palapa Perangkat Daerah.
- d. Koordinasi dan kerjasama yang solid dan dinamis dalam pelaksanaan kebijakan satu data di Kabupaten Mojokerto antara Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata dengan para pembina data di Kabupaten Mojokerto, yaitu Bappeda (selaku pembina data geospasial sekaligus Koordinator Forum Satu Data Palapa), BPKAD (selaku pembina data keuangan daerah) dan BPS Kabupaten Mojokerto (selaku pembina data statistik).
- e. Dilaksanakannya workshop penyusunan metadata statistik sektoral Perangkat Daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata bekerjasama dengan BPS Kabupaten Mojokerto selaku pembina data statistik, yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Mojokerto.

Beberapa faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja pada **Program Aplikasi Informatika** antara lain :

- a. Pelaksanaan review Arsitektur SPBE Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

- b. Penyusunan beberapa produk hukum antara lain Pedoman SDLC, SOP TIK dll.
- c. SDM TIK *programmer* yang berhasil menghasilkan aplikasi-aplikasi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- d. Dukungan IT *Leadership* yang kuat oleh Kepala Diskominfo maupun di Bupati.
- e. Perencanaan pembangunan TIK melalui Arsitektur SPBE sudah dilakukan dengan baik sehingga di tahap implementasi minim permasalahan.

Beberapa faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja pada **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota** antara lain :

- a. Pembentukan Tim CSIRT yang telah secara legal ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaunching Bupati dan BSSN. Ini merupakan prestasi yang membanggakan karena dilingkup Provinsi Jawa Timur, baru ada 2 kab/kota yang sudah membentuk Tim CSIRT sebelum Kabupaten Mojokerto.
- b. Pelaksanaan pelatihan teknis untuk ASN di bidang keamanan informasi sehingga tersertifikasi secara internasional.

Beberapa faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja pada **Program Informasi dan Komunikasi Publik** antara lain :

- a. Penyelenggaraan layanan call center 112 Surya Mojo Siaga yang telah resmi beroperasi 24 jam sejak di launchingnya pada bulan Maret 2022. Layanan ini telah secara aktif digunakan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat penanganan situasi darurat dan mempermudah koordinasi antar instansi terkait layanan gawat darurat
- b. Digunakannya sistem *Intelligence Media Analythic (IMA)* yang mampu memonitor seluruh media baik *online* maupun siber dimana data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi Pemkab Mojokerto.
- c. Dikeluarkannya izin radio Wika FM berikut surat keterangan Laik Operaasi (SK LO) sebagai prasyarat reaktivasi operasionalisasi radio Wika FM.
- d. Pembinaan KIM yang telah dilaksanakan telah berhasil membawa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) mandep manteb, ds. Kemlagi kec.

Kemlagi kab. Mojokerto sebagai juara ke-3 dalam kompetisi (KIM) Jatim di ajang Jatim Kominfo festival tahun 2022.

2. Faktor penghambat pencapaian kinerja

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja pada **Program Aplikasi Informatika** antara lain :

- a. Integrasi aplikasi atau layanan masih menjadi permasalahan yang selalu mengemuka ketika diperlukan konektifitas dan interoperabilitas data. Dalam skala kecil, permasalahan ini muncul ketika interkoneksi antara 2 aplikasi diperlukan. Sedangkan dalam skala besar adalah bagaimana seluruh layanan digital yang ada di Kabupaten Mojokerto terintegrasi dan saling bersinergi. Pada tahun 2023 sudah direncanakan pembangunan Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Pemerintah kabupaten Mojokerto. Maka tantangan berikutnya adalah bagaimana sistem ini digunakan secara maksimal sehingga integrasi aplikasi dan interoperabilitas data di Kabupaten Mojokerto benar-benar terwujud.
- b. Diperlukan akses internet yang stabil, lancar dan aman untuk seluruh stakeholder internal di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- c. Tuntutan digitalisasi mengharuskan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk terus mengembangkan aplikasi dan mengelolanya dengan baik sehingga dibutuhkan penambahan SDM yang cukup dan mumpuni seiring dengan banyaknya permintaan pembuatan aplikasi.
- d. Turunan kebijakan pusat dari Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE untuk beberapa bidang masih belum ada sehingga daerah dalam membuat kebijakan seringkali harus meraba-raba sendiri.
- e. Kurangnya awareness pemegang sertifikat elektronik tentang kerahasiaan dan pentingnya menjaga keamanan sertifikat elektronik
- f. Dashboard Command Center tidak maksimal digunakan dikarenakan paradigma saat ini bahwa executive dashboard harus bisa diakses dimana saja dan kapan saja, jadi tidak terikat tempat di command center
- g. Kurangnya SDM TIK Diskominfo dalam mendukung kebijakan Bupati terkait Pembangunan aplikasi seluruh OPD yang harus melalui Diskominfo
- h. Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dari pusat belum sempurna dan banyak error, mengingat sistem ini sangat penting.
- i. Belum adanya PIC TIK OPD yang ditetapkan dengan SK

Beberapa faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja pada **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota** antara lain :

- a. Indeks Kami terdiri dari banyak indikator yang belum semuanya dapat difokuskan pengembangannya.
- b. Beberapa peralatan radio telekomunikasi daerah pada kecamatan rusak sehingga PHKPS tidak bisa dilaksanakan secara optimal namun telah direncanakan dilakukan perubahan fasilitas pendukung untuk PHKS berupa perangkat handy talky untuk seluruh OPD dan instansi terkait pada PAPBD TA.2022, akan tetapi tidak bisa terealisasi dikarenakan ketersediaan HT pada penyedia tidak bisa secara menyeluruh sehingga rencana pengadaan peralatan penunjang komunikasi tersebut ditunda pada PAPBD Tahun 2023
- c. Proses audit belum dilaksanakan dikarenakan baru disosialisasikan oleh BSSN tahun kemari

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja pada **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** antara lain :

- a. Dalam publikasi/diseminasi data statistik sektoral pada portal Satu Data Palapa, masih terdapat Perangkat Daerah yang belum bisa menyediakan data sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditetapkan
- b. Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terkait penyusunan metadata statistik sektoral yang menjadi kewajibannya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
- c. Pengumpulan data statistik sektoral dari instansi vertikal yang ada di Kabupaten Mojokerto masih belum dapat dilaksanakan karena belum adanya MoU antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan instansi vertikal dimaksud

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja pada **Program Informasi dan Komunikasi Publik** antara lain :

- a. Tidak dapat dilaksanakan kegiatan pembuatan e-Magazine dikarenakan evaluasi terkait efektivitas serta efisiensi e-Magazine dan peralihan fungsi publikasi berita pada media sosial Pemerintah Daerah.
- b. Belum beroperasinya Radio WIKA FM dikarenakan izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal (ISR) terbit pada bulan

November Tahun 2022 akan tetapi Uji Laik Operasi (ULO) baru terbit pada tgl 17 Januari 2023.

- c. *Trouble website* PPID sehingga akun PPID Pembantu tidak bisa login
- d. Kurang aktifnya peran PPID Pembantu dalam melakukan desiminasi informasi.
- e. Kesalahan proses administrasi mengakibatkan tidak optimal pengalokasian anggaran di sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik terkait kegiatan penggunaan aplikasi *Intelligence Media Analythic IMA*.
- f. Kurangnya respon Perangkat Daerah terkait dalam menanggapi aspirasi/opini masyarakat yang disampaikan melalui media massa (media cetak dan media cyber)

Tindak lanjut atau alternatif solusi yang telah dilakukan dan akan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan di tahun berikutnya antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan input data kepada Perangkat Daerah melalui kegiatan desk secara berkala
2. Menyelenggarakan workshop dan pendampingan penyusunan metadata statistik sektoral bagi Perangkat Daerah
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto terkait inisiasi pelaksanaan kerjasama di bidang bagi pakai data antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Mojokerto
4. Optimalisasi transformasi digital dalam pengelolaan informasi publik
5. Melakukan percepatan penyelenggaraan operasional Radio Wika FM
6. Maintenance website PPID dan reaktifasi akun PPID Pembantu
7. Melakukan optimalisasi peningkatan kapasitas peran aktif PPID Pembantu dalam melaksanakan diseminasi informasi
8. Sehubungan dengan peningkatan utilitas internet maka diperlukan penambahan *access point* di seluruh OPD yang sekarang rata-rata di OPD ada 3-4, maka ke depannya akan direncanakan setiap OPD minimal 10 pemasangan *access point* akan tetapi dibutuhkan dukungan anggaran yang mencukupi
9. Pelaksanakan sosialisasi peningkatan *awareness* pemegang sertifikat elektronik tentang kerahasiaan dan pentingnya menjaga keamanan sertifikat elektronik

10. Membangun *executive dashboard mobile* yang bisa diakses oleh top manajemen dimana saja dan kapan saja
11. Membangun dari awal aplikasi SPLP sendiri yang direncanakan akan diintegrasikan dengan aplikasi SPLP pusat.
12. Penambahan SDM TIK Diskominfo dalam mendukung kebijakan Bupati terkait Pembangunan aplikasi seluruh OPD yang harus melalui Diskominfo.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

tabel 3.10
Tabel Capaian Anggaran Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE	29.303.880.365	24.655.091.262	84,14

tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE	105	84,14	20,86

tabel 3.12
Tabel Capaian Anggaran Sasaran


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dalam Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik.	Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik	29.303.880.365	24.655.091.262	84,14

tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dalam Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik.	Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik	127,16	84,14	43,02

tabel 3.14
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	%	%	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dalam Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik.	Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik	81%	103%	29.303.880.365	24.655.091.262	34%	0,34%



PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA ... (8/13)

efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right)}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

PK : Pencapaian keluaran	RVK : Realisasi volume keluaran
RAK : Realisasi anggaran per keluaran	TVK : Target Volume keluaran
PAK : Pagu anggaran per keluaran	n : Jumlah jenis keluaran

Keterangan tabel 3.16 sebagai berikut :

1. Apabila hasilnya < 20% : Sangat Efisien
2. Apabila hasilnya antara 21% - 85% : Efisien
3. Apabila hasilnya > 85% : Tidak Efisien

Berdasarkan tabel efisiensi anggaran belanja di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 dihasilkan nilai tingkat efisiensi sebesar 0,34 sedangkan nilai tingkat efisiensi sebesar 34 % yang artinya penggunaan anggaran belanja di Diskominfo Kabupaten Mojokerto dalam kategori efisien.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Tabel 3.15

Program	Indikator Program	Target	Realisasi				Realisasi Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2022
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Program Diskominfo yang Tercapai	100%				80%	80%	80%
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%				84,14%	84,14%	93,14%
	Indeks Profesionalitas ASN	80%				81,61%	81,61%	102,01%
	Nilai SAKIP PD	80,92 (A)				85,51 (A)	85,51 (A)	105,67%
	Nilai Reformasi Birokrasi PD	78 (BB)				83,25 (A)	83,25 (A)	106,73%
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik	86%	14,50%	14,63%	9,66%	56,37%	95,16%	110,65%
Program Aplikasi Informatika	Persentase Penyelenggaraan SPBE	81%	25,55%	23,73%	25,46%	23,74%	98,13%	121,14%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Mojokerto	76%	1,67%	12,15%	18,18%	125,68%	119,83%	157,68%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	76%	-	-	11,11%	60,99%	74,88%	98,53%

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari lima program yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022, terdapat 1 program yang tidak mencapai target dari total 5 program yang telah dilaksanakan sehingga persentase indikator program Diskominfo yang tercapai sebesar 80%.

Adapun realisasi kinerja 4 program yang mengalami keberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Realisasi kinerja sebesar 119,83% dari target yang telah ditetapkan sebesar 76% sehingga capaian kinerja lebih dari 100% yaitu 157,68% dengan kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan terdapat realisasi kinerja pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral mengalami kenaikan yang signifikan pada akhir tahun atas jumlah data statistik sektoral yang terpublikasikan dalam portal Satu Data Kab.Mojokerto dari target 1000 data terelisasi sebanyak 2190, sedangkan 50% data merupakan data statistik indikator LPPD selain itu tingkat partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah di Kab.Mojokerto dan kebijakan Satu Data Palapa yang telah ditetapkan menunjang keberhasilan dalam penyelenggaraan program ini.

2. Program Aplikasi Informatika

Realisasi sebesar 89,13 dari target 81% sehingga capain kinerja lebih dari 100% yaitu 121,14% dengan kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan beberapa keberhasilan atas pelaksanaan beberapa hal diantaranya :

- Pelaksanaan review Arsitektur SPBE Kabupaten Mojokerto Tahun 2022
- Penyusunan beberapa produk hukum antara lain Peraturan Bupati tentang Tata Kelola SPBE, penyusunan dokumen *Master Plan Smart City* Kabupaten Mojokerto, Pedoman SDLC serta SOP TIK.
- SDM TIK *programmer* yang berhasil menghasilkan aplikasi-aplikasi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- Dukungan IT *leadership* yang kuat oleh Kepala Diskominfo maupun di Bupati.
- Perencanaan pembangunan TIK melalui Arsitektur SPBE sudah dilakukan dengan baik sehingga di tahap implementasi minim permasalahan.

3. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Realisasi kinerja sebesar 95,16% dari target yang telah ditetapkan sebesar 86% sehingga capaian kinerja lebih dari 100% yaitu 110,65% dengan kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan karena terdapat beberapa sub kegiatan yang terlaksana secara optimal diantaranya :

a. Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan layanan call center 112 Surya Mojo Siaga yang telah resmi beroperasi 24 jam sejak di launchingnya pada bulan Maret 2022. Layanan ini telah secara aktif digunakan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat penanganan situasi darurat dan mempermudah koordinasi antar instansi terkait layanan gawat darurat dan telah terhubung dengan 13 instansi.

b. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Digunakannya sistem *Intelligence Media Analythic (IMA)* yang mampu memonitor seluruh media baik *online* maupun siber dimana data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi Pemkab Mojokerto.

c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Optimalisasi publikasi informasi dan dokumentasi Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah melalui berbagai media sehingga diperoleh realisasi kinerja yang melebihi target-target yang telah ditetapkan. Dikeluarkannya izin radio Wika FM berikut surat keterangan Laik Operaasi (SK LO) sebagai prasyarat reaktivasi operasionalisasi radio Wika FM.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdapat 5 indikator utama dalam penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah antara lain Persentase Indikator Program Diskominfo yang tercapai, Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, Indeks Profesionalitas ASN, Nilai SAKIP PD, Nilai Reformasi Birokrasi PD dengan hasil sebagaimana disajikan dalam tabel 3.11.

Terdapat 3 indikator utama dengan capaian kinerja lebih dari 100% yaitu Indeks Profesionalitas ASN yaitu sebesar 102,01%. Ini menunjukkan bahwa SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang relatif cukup tinggi.

Sedangkan perolehan nilai SAKIP Diskominfo yaitu 85,51% dengan predikat A (memuaskan) serta perolehan nilai Reformasi Birokrasi Diskominfo yaitu 83,25 dengan predikat A (memuaskan).

Adapun program yang mengalami kegagalan dalam pencapaian target kinerjanya yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Realisasi sebesar 74,88% dari target yang telah ditetapkan sebesar 76% sehingga capaian kinerja tidak 100% yaitu sebesar 98,53%. Hal ini disebabkan karena beberapa sub kegiatan gagal mencapai target kinerjanya yaitu pada sub kegiatan berikut :

a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan audit keamanan informasi hanya 3 sistem elektronik antara lain Mojokertokab, yang telah diaudit oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara dari total 10 sistem elektronik yang telah ditargetkan.

a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Hasil pengukuran atas Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) berdasarkan *self assessment* oleh pihak ketiga diperoleh skor kategori sistem elektronik rendah (15) dan status kesiapan dengan skor 123 (tidak layak). Rendahnya hasil indeks KAMI dikarenakan masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan pada aspek tata kelola, resiko, kerangka kerja, pengelolaan asset, teknologi serta pengamanan fisik sebagaimana dijabarkan pada laporan hasil evaluasi Indeks KAMI.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Dalam Laporan Realisasi Anggaran ini terdiri dari anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3.2.1 Membandingkan antara target dan realisasi anggaran tahun ini

tabel 3.16
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2022

No. Urut	Kode Rekening Kegiatan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran 2022	Presentase Realisasi
1	2	3	4	5	6
	2.16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.303.880.365,00	24.655.091.262,00	84,14%
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	11.554.760.500,00	7.542.174.862,00	65,27%
1	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000,00	16.816.800,00	98,92%
1	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.466.800,00	99,56%
2	2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.500.000,00	9.350.000,00	98,42%
2	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.276.948.000,00	4.048.826.309,00	94,67%
1	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.276.948.000,00	4.048.826.309,00	94,67%
3	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.400.000,00	32.496.000,00	84,63%
1	2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.400.000,00	32.496.000,00	84,63%
4	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.763.412.500,00	3.021.646.160,00	44,68%
1	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	39.885.500,00	99,71%
2	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.593.412.500,00	2.861.604.660,00	43,40%
3	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.000.000,00	24.646.000,00	94,79%
4	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	19.624.000,00	98,12%
5	2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	29.000.000,00	28.730.000,00	99,07%
6	2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	4.954.000,00	99,08%
7	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	42.202.000,00	84,40%
5	2.16.01.2.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.000.000,00	135.786.718,00	78,95%
1	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00	93.786.718,00	72,14%
2	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00%

6	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	287.000.000,00	286.602.875,00	99,86%
1	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.000.000,00	104.875.000,00	99,88%
2	2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.000.000,00	154.827.875,00	99,89%
3	2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000,00	26.900.000,00	99,63%
2	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.672.548.000,00	6.369.125.279,00	95,45%
1	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.672.548.000,00	6.369.125.279,00	95,45%
1	2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	325.000.000,00	212.009.580,00	65,23%
2	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	952.548.000,00	898.019.018,00	94,28%
3	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	650.000.000,00	577.962.410,00	88,92%
4	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	4.695.000.000,00	4.669.814.271,00	99,46%
5	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	50.000.000,00	11.320.000,00	22,64%
3	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	10.479.071.865,00	10.151.824.582,00	96,88%
1	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.690.071.865,00	8.689.184.888,00	99,99%
1	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8.690.071.865,00	8.689.184.888,00	99,99%
2	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.789.000.000,00	1.462.639.694,00	81,76%
1	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.008.000.000,00	897.423.800,00	89,03%

2	2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	81.000.000,00	53.460.500,00	66,00%
3	2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	75.000.000,00	70.015.174,00	93,35%
4	2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	70.000.000,00	38.863.820,00	55,52%
5	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	110.000.000,00	65.897.900,00	59,91%
6	2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	100.000.000,00	92.241.000,00	92,24%
7	2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	120.000.000,00	93.194.000,00	77,66%
8	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100.000.000,00	61.434.500,00	61,43%
9	2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	25.000.000,00	15.850.000,00	63,40%
10	2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	100.000.000,00	74.259.000,00	74,26%
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	200.000.000,00	197.340.713,00	98,67%
1	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	148.392.713,00	98,93%
1	2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.752.000,00	99,01%
2	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.505.600,00	99,34%
3	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	50.000.000,00	49.135.113,00	98,27%
2	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat	50.000.000,00	48.948.000,00	97,90%

		Daerah Kabupaten/Kota			
1	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.948.000,00	97,90%
5	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	397.500.000,00	394.625.826,00	99,28%
1	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	397.500.000,00	394.625.826,00	99,28%
1	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	225.000.000,00	223.845.998,00	99,49%
2	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	112.500.000,00	110.969.928,00	98,64%
3	2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	60.000.000,00	59.809.900,00	99,68%
TOTAL			29.303.880.365,00	24.655.091.262,00	84,14%

tabel 3.17

Capaian Anggaran Tujuan

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						29.303.880.365	24.655.091.262	84,22%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	MENINGKATNYA TATA KELOLA BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL		100%	99,61%	99,61%	11.554.760.500	7.542.174.862	65,27%
			PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM PD YG TERCAPAI	100%	117,52%	117,52%			
			PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	90%	84,14%	93,48%			
			INDEKS PROFESIONALITAS ASN PERANGKAT DAERAH	80%	80,23%	100,29%			
			NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	80,92 (A)	85,51 (A)	105,67%			
			Nilai RB Perangkat Daerah	78 (BB)	83,25 (A)	106,73%			
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	17.000.000	16.816.800	98,92%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7.500.000	7.466.800	99,56%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	6 Dokumen/ Laporan	6 Dokumen/ Laporan	100%	9.500.000	9.350.000	98,42%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.276.948.000	4.048.826.309	94,67%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%	4.276.948.000	4.048.826.309	94,67%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah.	Persentase Terpenuhinya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	38.400.000	32.496.000	84,63%
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	32 Pegawai	32 Pegawai	100%	38.400.000	32.496.000	84,63%
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Cukai		2 Kegiatan					
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	97,68%	97,68%	6.763.412.500	3.021.646.160	44,68%

7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	40.000.000	39.885.500	99,71%
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	6.593.412.500	2.861.604.660	43,40%
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	26.000.000	24.646.000	94,79%
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100%	20.000.000	19.624.000	98,12%
11	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Bahan / Material	12 Bulan	12 Bulan	100%	29.000.000	28.730.000	99,07%
12	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	100%	5.000.000	4.954.000	99,08%
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Kali	67 Kali	83,75%	50.000.000	42.202.000	84,40%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	172.000.000	135.786.718	78,95%
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	130.000.000	93.786.718	72,14%
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	42.000.000	42.000.000	100%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	287.000.000	286.602.875	99,86%
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Kendaraan Dinas	14 Kendaraan Dinas	100%	105.000.000	104.875.000	99,88%
17	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100%	155.000.000	154.827.875	99,89%
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Terpenuhinya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100%	27.000.000	26.900.000	99,63%
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	86%	95,16%	110,65%	6.672.548.000	6.369.125.279	95,45%
7	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten		Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	95,16%	95,16%	6.672.548.000	6.369.125.279	95,45%

	/ Kota								
19	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Komunikasi dan Informatika	80%	88,98%	111,23%	325.000.000	212.009.580	65,23%
			Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas	120 Berita	120 Berita	100%			
20	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Persentase diseminasi informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	80%	90%	112,50%	952.548.000	898.019.018	94,28%
			Jumlah media luar ruang	36 Media Luar Ruang	36 Media Luar Ruang	100%			
			Jumlah Rubrik Klik Mojo yang dihasilkan	5 Rubrik	-	0,00%			
			Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah	57 Video	-	135,09%			
			Jumlah Terpublikasinya Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah	480 Berita	839 Berita	174,79%			
			Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Literasi Media Sosial	57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah	100%			
21	Pelayanan Informasi Publik		Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	80%	100%	125,00%	650.000.000	577.962.410	88,92%
			Jumlah Informasi yang Terpublikasikan pada Layanan Website PPID	60 Informasi	71 Informasi	118,33%			
			Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang Terselesaikan	30 Pengaduan yg Terselesaikan	50 Pengaduan yg Terselesaikan	166,67%			
			Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang Terlatih IT	15 Kelompok Masy Milenial yg Terlatih IT	13 Kelompok	86,67%			
			Jumlah Layanan Call Center	10 Layanan Call Center	13 Layanan	130,00%			
			Jumlah Pengaduan pada Layanan Aplikasi LAPOR SP4N yang Terselesaikan	160 Pengaduan yg Terselesaikan	82 Pengaduan yg Terselesaikan	51,25%			
22	Layanan Hubungan Media		Jumlah Hubungan Media yang Sesuai Regulasi	96 Hubungan Media	94 Hubungan Media	97,92%	4.695.000.000	4.669.814.271	99,46%
23	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	18 KIM yang aktif	10 KIM yang aktif	55,56%	50.000.000	11.320.000	22,64%
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Penyelenggaraan SPBE	81%	98,13%	121,60%	10.479.071.865	10.161.654.582	96,97%
8	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	8.690.071.865	8.689.184.888	99,99%

24	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	8.690.071.865	8.689.184.888	99,99%	
9	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	96,25%	96,25%	1.789.000.000	1.462.639.694	81,76%	
25	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	2 kebijakan	2 Kebijakan	100%	1.008.000.000	897.423.800	89,03%	
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	100%	100%				
			Persentase layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online	100%	100%	100%				
26	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi dalam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	88%	100%	113,64%	81.000.000	53.460.500	66,00%	
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Persentase PD yang memanfaatkan sertifikat elektronik	80%	100%	100%	75.000.000	70.015.174	93,35%	
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Persentase PD yang mengintegrasikan datanya dalam dashboard command centre	50%	8,77%	35,08%	70.000.000	38.863.820	55,52%	
29	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Persentase dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	50%	74%	148,00%	110.000.000	65.897.900	59,91%	
30	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Persentase PD yg memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah	50%	0%	0,00%	100.000.000	92.241.000	92,24%	
31	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas		Persentase kegiatan yang terfasilitasi command center	85%	66%	77,65%	120.000.000	93.194.000	77,66%	
			Persentase implementasi smart government	65%	100%	153,85%				
32	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	10 Orang	10 Orang	100%	100.000.000	61.434.500	61,43%	
33	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Jumlah rekomendasi/persetujuan	10 Rekomendasi/Persetujuan	15 Rekomendasi/Persetujuan	150,00%	25.000.000	15.850.000	63,40%	
34	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Jumlah kegiatan monev SPBE yang terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	100.000.000	74.259.000	74,26%	
4	PROGRAM PENYELENGGAR	Meningkatnya Penyelenggaraan	Persentase Penyelenggaraan	76%	74,88%	98,53%	200.000.000	197.340.713	98,67%	

	AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota						
10	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	70,04%	70,04%	150.000.000	148.392.713	98,93%
34	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100,00%	25.000.000	24.752.000	99,01%
36	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Sistem Elektronik/Aset Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah	10 Sistem Elektronik	0 Sistem Elektronik	30,00%	75.000.000	74.505.600	99,34%
37	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik	3 Sistem Elektronik	3 Sistem Elektronik	100,00%	50.000.000	49.135.113	98,27%
			Indeks KAMI	sistem elektronik bernilai tinggi(16) & status kesiapan cukup (460)	sistem elektronik bernilai rendah (15) & status kesiapan cukup (123)	60,24%			
11	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	100%	26,31%	79,73%	50.000.000	48.948.000	97,90%
38	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Persentase titik PHKS yang diamankan	33%	26,31%	79,73%	50.000.000	48.948.000	97,90%
5	PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto	76%	119,83%	157,68%	397.500.000	394.625.826	99,28%
12	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Mojokerto	100%	119,83%	119,83%	397.500.000	394.625.826	99,28%
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah	100,00%	225.000.000	223.845.998	99,49%
			Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan dalam portal Satu Data Kab.Mojokerto	1000 Data	2190 Data	219,00%			
40	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	29 Dokumen	29 Dokumen	100%	112.500.000	110.969.928	98,64%
41	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral yg Dihimpun	29 Dokumen	29 Dokumen	100%	60.000.000	59.809.900	99,68%

3.2.2 Membandingkan antara realisasi anggaran tahun ini dengan tahun lalu;

Tabel 3.18

No	Sasaran 2021	Program / Kegiatan 2021	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan AnggaranRenja Dinas Komunikasi Dan Informatika 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi 2021	Bidang Penanggung Jawab	No	Sasaran 2022	Program / Kegiatan 2022	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan AnggaranRenja Dinas Komunikasi Dan Informatika 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi 2022
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6
				Rp	Rp						Rp	Rp
1	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Program Diskominfo yang Tercapai	5.929.076.835	5.186.157.746	Sekretariat		Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE dalam Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		11.554.760.500	7.542.174.862
1			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah							Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai		
2			Indeks Profesionalitas ASN							Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		
3			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Program Penunjang PD							Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		
			Nilai SAKIP PD							Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Nilai Reformasi Birokrasi PD							Nilai RB Perangkat Daerah		
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun	13.000.000	12.996.050	Sekretariat			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	17.000.000	16.816.800

	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Sesuai Ketentuan						Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan			
5	Terlaksananya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	5.000.000	4.999.550				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	7.500.000	7.466.800
6	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	8.000.000	7.996.500				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	9.500.000	9.350.000
7	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.594.549.535	4.030.902.829	Sekretariat			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	4.276.948.000	4.048.826.309
	Terlaksananya Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Sesuai Ketentuan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	4.580.549.535	4.016.923.485				Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	4.276.948.000	4.048.826.309
2	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sesuai Ketentuan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	14.000.000	13.979.344				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tersusun sesuai Ketentuan		
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
									Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya		

9	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	706.527.300	639.642.477	Sekretariat			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.763.412.500	3.021.646.160
10	Terlaksananya Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	32.198.375				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	39.885.500
11	Terlaksananya Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	525.300.000	508.391.375				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.593.412.500	2.861.604.660
12	Terlaksananya Pemenuhan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Pemenuhan Bahan Logistik Kantor	20.576.500	20.548.000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	26.000.000	24.646.000
13	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Kunjungan Tamu di Kantor	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Pemenuhan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.412.800	1.410.907				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	19.624.000
3	Terlaksananya Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Waktu Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.000.000	18.069.322				Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Bahan / Material	29.000.000	28.730.000
14	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Waktu Pemenuhan Bahan/Material Kantor	40.500.000	40.297.498				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	4.954.000
4	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pemenuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.738.000	18.727.000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	42.202.000

15	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.000.000	66.851.232	Sekretariat			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.000.000	135.786.718
16	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000	66.851.232				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	93.786.718
17	Terlaksananya Pemenuhan Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000	-				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000	42.000.000
18	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.000.000	435.765.158	Sekretariat			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.000.000	286.602.875
19	Terlaksananya Pemenuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	103.000.000	102.000.000				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.000.000	104.875.000
20	Operasional atau Lapangan Sesuai Ketentuan		Jumlah Waktu Pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional									
5	Terlaksananya Pemenuhan Pemeliharaan/Re	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Waktu Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan	305.000.000	302.535.158				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan	155.000.000	154.827.875

	habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lainnya	Bangunan Lainnya					Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
21			Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor								
22	Terlaksananya Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.000.000	31.230.000			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Terpenuhinya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000	26.900.000
23	Terlaksananya Program Informasi dan Komunikasi Publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Kualitas Media Komunikasi, Layanan Informasi dan Pengelolaan Dokumentasi	2.037.260.021	1.525.887.859	Komunikasi dan Informasi Publik		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	6.672.548.000	6.369.125.279
24	Meningkatnya Kualitas Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	2.037.260.021	1.525.887.859	Komunikasi dan Informasi Publik		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	6.672.548.000	6.369.125.279
25	Terlaksananya Pemenuhan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Komunikasi dan Informatika	350.000.000	295.540.200			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Komunikasi dan Informatika	325.000.000	212.009.580
6			Jumlah Opini dan Aspirasi Publik Yang Menjadi Isu Prioritas						- Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas		
26	Terlaksananya Pemenuhan Pengelolaan Media	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Program Siaran Radio					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM		
27	Komunikasi Publik		Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah Yang Terdokumentasi dan Terpublikasikan dalam	912.387.070	784.397.163				Jumlah media luar ruang	952.548.000	898.019.018

			Website Pemerintah Daerah dan Media Sosial Lainnya									
										Jumlah Rubrik Klik Mojo yang dihasilkan		
										Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah		
										Jumlah Terpublikasinya Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah		
										Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Literasi Media Sosial		
28	Terlaksananya Pemenuhan Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik		624.872.951	403.033.936				Pelayanan Informasi Publik	Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		
										Jumlah Informasi yang Terpublikasikan pada Layanan Website PPID		
29			Jumlah PPID Perangkat Daerah Yang Sesuai Regulasi							Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang terselesaikan	650.000.000	577.962.410
			Jumlah Pengaduan Pada Layanan Aplikasi LAPOR! SP4N							Jumlah Pengaduan pada Layanan Aplikasi LAPOR SP4N yang terselesaikan		
			Jumlah Trial Layanan Call Center							Jumlah Layanan Call Center		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial Yang Terlatih IT							Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang Terlatih IT		
									Layanan Hubungan	Jumlah Hubungan		

									Media	Media yang Sesuai Regulasi	4.695.000.000	4.669.814.271
30	Terlaksananya Pemenuhan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat Yang Terbina	150.000.000	42.916.560				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	50.000.000	11.320.000
3	Meningkatnya Kualitas Aplikasi Informatika	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	10.142.049.051	9.902.611.169	Informatika			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyelenggaraan SPBE	10.479.071.865	10.151.824.582
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemda	8.999.803.255	8.865.556.325	Informatika			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	8.690.071.865	8.689.184.888
31	Terlaksananya Pemenuhan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Jaringan Internet	8.999.803.255	8.865.556.325				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		8.690.071.865	8.689.184.888
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemda Kab.Mojokerto	1.142.245.796	1.037.054.844	Informatika			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.789.000.000	1.462.639.694
32	Terlaksananya Pemenuhan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengelolaan Aplikasi E- Government	531.192.538	473.061.658				Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-	1.008.000.000	897.423.800

	dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota							Kabupaten / Kota	government		
										Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
										Persentase layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online		
33	Terlaksananya Pemenuhan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Menu Website	81.000.000	79.882.000				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi dalam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	81.000.000	53.460.500
									Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase PD yang memanfaatkan sertifikat elektronik	75.000.0000	70.015.174
34	Terlaksananya Pemenuhan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Pengelolaan Subdomain	70.000.000	63.687.502				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase PD yang mengintegrasikan datanya dalam dashboard command centre	70.000.000	38.863.820
35	Terlaksananya Pemenuhan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi	110.000.000	88.178.295				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	110.000.000	65.897.900
									Penyelenggaraan Sistem Penghubung	Persentase PD yg memanfaatkan sistem	100.000.000	92.241.000

								Layanan Pemerintah	penghubung layanan pemerintah		
36	Meningkatnya Kualitas Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah Kegiatan Yg Terfasilitasi Command Center	100.000.000	91.874.000			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	Persentase kegiatan yang terfasilitasi command center	120.000.000	93.194.000
37	Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Uji Coba Penerapan teknologi informasi dan IOT untuk Kota Cerdas							Persentase implementasi smart government	
38	Terlaksananya Pemenuhan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM TIK Yang Terlatih	151.000.000	145.088.131			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100.000.000	61.434.500
								Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah rekomendasi/persetujuan	25.000.000	15.850.000
39	Terlaksananya Pemenuhan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Monev dan Rakor Tim Yang Terlaksana	99.053.258	95.283.258			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah kegiatan monev SPBE yang terlaksana	100.000.000	74.259.000
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, Persandian, Pengamanan Informasi dan Statistik Sektoral	411.668.000	383.787.150	Pengelolaan Data dan Statistik		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto	397.500.000	394.625.826
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, Persandian, Pengamanan Informasi dan Statistik Sektoral	411.668.000	383.787.150	Pengelolaan Data dan Statistik		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Mojokerto	397.500.000	394.625.826

	Kabupaten/Kota											
40	Terlaksananya Pemenuhan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	Jumlah Aplikasi/Dokumen Statistik Sektoral						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	225.000.000	223.845.998
			Jumlah Pengumpulan Data	411.668.000	383.787.150					Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan dalam portal Satu Data Kab.Mojokerto		
									Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	112.500.000	110.969.928
									Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	60.000.000	59.809.900
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	197.471.140	104.594.300	Informatika			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	200.000.000	197.340.713
1	Meningkatnya Kualitas Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemda Kab Mojokerto	153.621.140	63.804.800	Informatika			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	150.000.000	148.392.713
									Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan	25.000.000	24.752.000

41	Terlaksananya Pemenuhan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ruang Lingkup Keamanan Informasi Yg Teraudit	61.279.857	56.710.900				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Elektronik/Aset Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah	75.000.000	74.505.600
42	Terlaksananya Pemenuhan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Penerimaan Berita Sandi dan Yang Tersampaikan	92.341.283	7.093.900				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik	50.000.000	49.135.113
	Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Indeks KAMI							Indeks KAMI		
2	Meningkatnya Kualitas Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kab Mojokerto	43.850.000	40.789.500	Informatika			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	50.000.000	48.948.000
43	Terlaksananya Pemenuhan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab.Mojokerto	43.850.000	40.789.500				Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase titik PHKS yang diamankan	50.000.000	48.948.000
JUMLAH				18.717.525.047	17.103.038.224						29.303.880.365	24.655.091.262
				%	91,37						%	84,14%

Dalam tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat secara umum bahwa Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto mendapat alokasi anggaran untuk Program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Mojokerto di tahun 2022 untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebesar Rp. 29.303.880.365,- dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 17.103.038.224,- atau sebesar 84,14 persen, sedangkan realisasi akuntabilitas kinerja sebesar 117,52 persen.

Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 sebesar 84,22% dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran sebelum Perubahan APBD sebesar	Rp. 21.072.616.000
Penambahan APBD sebesar	<u>Rp. 8.231.264.365+</u>
Anggaran setelah Perubahan	Rp. 29.303.880.365
Realisasi	<u>Rp. 24.655.091.262</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	<u>Rp. 4.648.789.103</u>

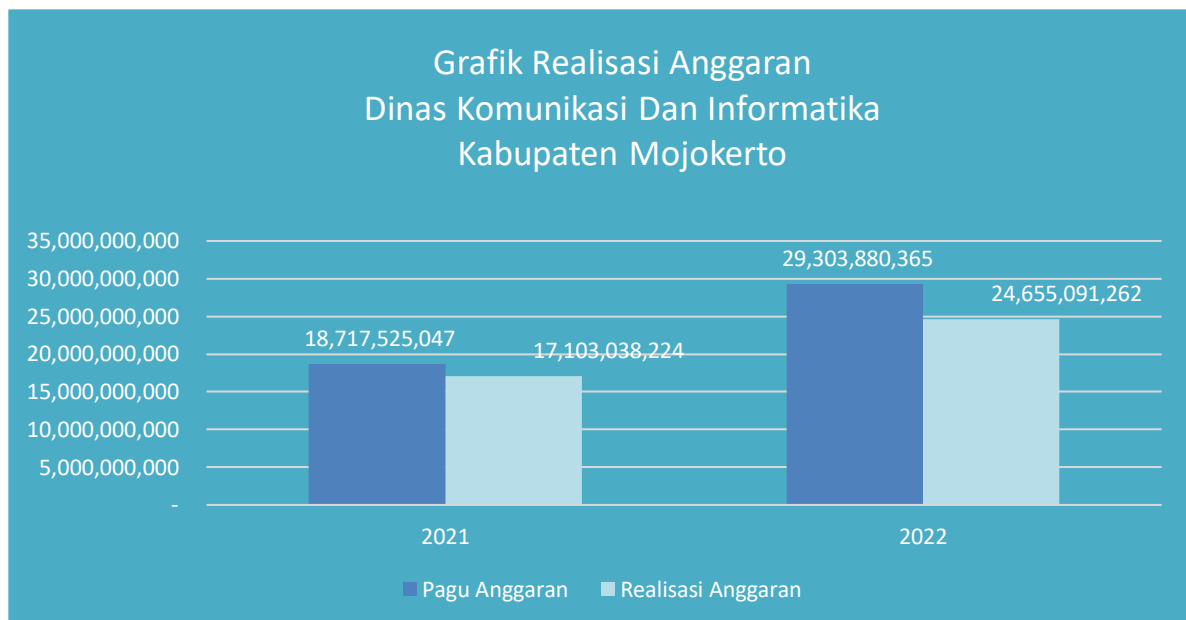
Hambatan dan kendala pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika sebesar 100% dalam penyerapan anggaran tahun 2022 ada 10 (sepuluh) sub kegiatan yang pencapaian target realisasinya di bawah 80% yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu anggaran sebesar Rp.6.593.412.500, Realisasi Rp.2.861.604.660 atau 43,40%. Sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp.3.731.807.840 dikarenakan pihak ketiga selaku penyedia yang ditunjuk tidak bisa memenuhi jumlah barang secara lengkap sesuai pesanan mengingat kuantitas pesanan yang sangat banyak dalam waktu yang singkat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pagu anggaran sebesar Rp. 130.000.000, Realisasi Rp. 93.786.718 atau 72,14%. Sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp. 36.213.282 dikarenakan Realisasi sesuai dengan tagihan/print out yang ada;
3. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Elektronik Pagu anggaran sebesar Rp.325.000.000 Realisasi Rp.212.009.580 atau 65,37%. Sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp.112.990.420 dikarenakan Kontrak IMA berlangsung 8 bulan sejak bulan Mei s/d Desember 2022 yang seharusnya 12 bulan. Untuk pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak dilaksanakan karena terdapat salah penempatan pada honorarium IKM dan terdapat aplikasi E-Sukma yang berasal dari Pemprov yang outputnya IKM;
4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Elektronik Pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000, Realisasi Rp.11.320.000 atau

- 22,64%. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp.38.680.000,00 dikarenakan Tidak terlaksananya pekan KIM tingkat propinsi;
5. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Elektronik Pagu anggaran sebesar Rp.81.000.000, Realisasi Rp.53.460.500, atau 66,00%. Sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp.27.539.500,00 dikarenakan Tidak terlaksananya Maintenance Jaringan Internet FO selama 3 Bulan pertama karena terdapat kendala dalam rekening;
 6. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Pagu anggaran sebesar Rp.70.000.000 Realisasi Rp. 38.863.820 atau 55,52%. Sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp. 31.136.180 dikarenakan Honor Narasumber yang dianggarkan tidak bisa terserap karena Sosialisasi Review Arsitektur SPBE diundur tahun depan;
 7. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Rp.110.000.000 Realisasi Rp. 65.897.900 atau 59,91%. Sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp. 44.102.100 dikarenakan Belanja modal *Goodwill (Google Map API)* tidak bisa terealisasi karena sistem pembayaran *Google* menggunakan kartu kredit;
 8. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Rp.100.000.000 Realisasi Rp.61.434.500 atau 61,43%. Sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp.38.565.500,00 dikarenakan Honor Narasumber Internal yang dianggarkan untuk *upgrade* kompetensi PIC TIK tidak bisa terserap dikarenakan SK PIC TIK dari OPD banyak yang belum terkumpul;
 9. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Rp.25.000.000 Realisasi Rp.15.850.000 atau 63,40%. Sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp. 9.150.000,00 dikarenakan Terdapat SPPD yang tidak terserap;
 10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Rp.100.000.000 Realisasi Rp.74.259.000 atau 74,26%. Sisa Lebih Perhitungan anggaran sebesar Rp. 25.741.000,00 dikarenakan cetak buku tidak terserap dikarenakan format buku Arsitektur SPBE berubah sehingga tidak sesuai spek cetak, dan terdapat Perubahan di Akhir Tahun sehingga tidak sempat ubah rincian objek.

tabel 3.19
Realisasi Anggaran
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Penyerapan Anggaran
2021	Rp. 18.717.525.047	Rp. 17.103.038.224	91,37%
2022	Rp. 29.303.880.365	Rp. 24.655.091.262	84,14%



Pada Grafik diatas dapat disampaikan bahwa Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto mendapatkan kenaikan pagu anggaran yang relatif besar akan tetapi realisasi pada tahun 2022 tidak bisa optimal sehingga tingkat penyerapannya relatif lebih rendah 7,23% jika dibandingkan dengan tingkat penyerapan tahun lalu.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dalam rangka melaksanakan berbagai kewajiban untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan melaksanakan tugas pemerintahan.

Pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto menetapkan 7 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang merupakan gambaran dari tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat secara umum bahwa Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto mendapat alokasi anggaran untuk Keseluruhan Program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 29.303.880.365,00,-. untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 24.655.091.262,00,- atau 84,14 persen, sedangkan untuk realisasi IKU Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2022 dengan indikator Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik yaitu 117,52% dari target 81% sehingga capaian IKU menjadi 127,16% dengan kategori sangat baik. Realisasi pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 tanpa kegiatan rutin sekretariat sebesar 98.05%, sedangkan realisasi kinerja Program Dan Kegiatan beserta Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rutin sebesar 96.49%.